

# LAPORAN AKHIR PENELITIAN



## MODEL PRAKTIKUM MATAKULIAH PADA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU PEMERINTAHAN FHSIP UNIVERSITAS TERBUKA

**Tim Peneliti:**

Oleh:

Ayi Karyana/ 0017086106  
Dina Fadiyah/199008202021TKT1458  
Nong Ayu Triyanti Utami Hakim/199001102019032014  
Sapto Setyo Nugroho/199601172021TKT1457  
Laras Ayu Andini/199208112022032007  
Daniel Pasaribu/198710252019031014

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN PENELITIAN TERAPAN**

1.	a.	Judul Penelitian	: Model Praktikum Matakuliah Pada Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan FHISIP Universitas Terbuka
	b.	Skema Penelitian	: RPI-Kompetitif Penelitian Terapan
	c.	Rumpun Ilmu	: Ilmu Pemerintahan
	d.	Tingkat Kesiapan Terapan Teknologi (TKT)	: 1-3
2.		Ketua Peneliti	:
	a.	Nama Lengkap & Gelar	: Drs. Ayi Karyana, M.Si
	b.	NIP/NIDN	: 196108171992031002/ 0017086106
	c.	Golongan Kepangkatan	: IV/b
	d.	Jabatan Akademik	: Lektor Kepala
	e.	Fakultas	: Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
	f.	Unit Kerja	: Universitas Terbuka
	g.	Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
3.		Anggota Peneliti	:
	a.	Nama Anggota I	: Dina Fadiyah, S.IP., M.A.
	b.	NIP/NIDN	: 199008202021TKT1458/0320059002
	c.	Nama Anggota II	: Nong Ayu Triyanti Utami Hakim, S.IP., M.IP
	d.	NIP/NIDN	: 1990011902019032014/0010019003
	e.	Nama Anggota III	: Sapto Setyo Nugroho, S.IP., MA
	f.	NIP/NIDN	: 199601172021TKT1457/0017019602
	g.	Nama Anggota IV	: Laras Ayu Andini, S.I.P., M.Sos.
	h.	NIP/NIDN	: 199208112022032007/0011089207
	i.	Nama Anggota V	: Daniel Pasaribu, S.Pd., M.A.
	j.	NIP/NIDN	: 198710252019031014/0025108704
4.	a.	Tahun Penelitian	: 2023
	b.	Lama Penelitian	: 2 tahun
5.		Biaya Penelitian	:
	a.	Diusulkan	: Rp 101.822.000
	b.	Disetujui	: Rp 93.831.000
6.		Sumber Biaya	: DIPA Universitas Terbuka Tahun Anggaran 2023 Nomor: B/612/UN31.LPPM/PT.01.03/2023 Tanggal 20 Februari 2023

Tangerang Selatan, 28 November 2023



Menyetujui,  
Ketua LPPM,

Dra. Dewi Artati Padmo Putri, M.A., Ph.D.  
196107241987102003

Ketua Peneliti,

Drs. Ayi Karyana, M.Si  
NIP. 196108171992031002

Kepala Pusat Riset dan Inovasi PTJJ pada LPPM,

Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D.  
NIP. 196407221989031019

## RINGKASAN

Penelitian “Model Praktikum Mata kuliah Pada Program Studi (PS) Ilmu Pemerintahan FHSIP Universitas Terbuka.” didasarkan pada kurikulum baru (kurba) berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) dengan tujuan, profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan (CPL), yang di dalam kurikulumnya terdapat mata kuliah yang bermuatan praktikum sebanyak 34 mata kuliah (40 sks), sehingga diperlukan adanya kajian model praktikum mata kuliah yang sesuai dengan karakteristik mahasiswa dalam sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) yang berbasis outcomes. Outcomes adalah pengetahuan (*knowledge*) dan keahlian (*skill*) yang harus dapat diukur (*concretely measurable*). Penelitian ini di fokuskan pada mata kuliah dengan tujuan untuk mengetahui model praktikum mata kuliah yang tepat dan dapat di laksanakan dalam sistem PTTJJ, sehingga dengan mendapatkan model praktikum yang dapat diterapkan pada program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka (FHSIP UT).

Penelitian ini menggunakan teori dari Cooper et al., (2010) mengenai Model Pembelajaran Kerja Terintegrasi yaitu Tujuan, Konteks, Integrasi, Kurikulum, Learning, Kemitraan, Dukungan. Dari 7 (tujuh) dimensi yang menyelaraskan dengan komponen praktikum. Keberhasilan pelaksanaan model pembelajaran kerja terpadu perlu mencakup semua tujuh dimensi. Penting untuk dicatat bahwa tujuh dimensi tidak dianggap hirarkis atau saling eksklusif, dengan menggunakan teori tersebut dapat menentukan model praktikum yang tepat untuk praktikum mata kuliah di PS Ilmu Pemerintahan FHSIP Universitas Terbuka.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memahami berbagai aspek yang ada dalam matakuliah berpraktikum Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan menentukan jenis model praktikum mata kuliah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model praktikum mata kuliah yang dikembangkan adalah pilihan dari berbagai kegiatan unggulan dalam bidang pemerintahan yang secara general dapat dilaksanakan oleh mahasiswa dimanapun berada yang pelaksanaannya dapat dipraktikkan di tempat kerja atau lokasi mahasiswa dimanapun berdomisili, dan kriteria untuk tutor/instruktur harus memiliki kualifikasi keilmuan yang sesuai dan memiliki pengalaman dalam bidang pemerintahan. Untuk proses pelaksanaan praktikum mata kuliah Program Studi Ilmu Pemerintahan, mahasiswa melakukan observasi partisipan ke instansi pemerintah atau perusahaan, dengan alat evaluasi berupa laporan praktik kerja yang dilegalisasi oleh Universitas Terbuka Daerah (UT Daerah), pimpinan langsung atau pimpinan dari instansi pemerintah atau perusahaan tempat mahasiswa melakukan praktik mata kuliah.

Kata Kunci: desain kurikulum, mata kuliah praktikum, model praktikum mata kuliah

## **PRAKATA**

Segala Puji dan Syukur kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA sehingga laporan akhir penelitian yang berjudul “Model Praktikum Mata kuliah Pada Program Studi (PS) Ilmu Pemerintahan FHSIP Universitas Terbuka” ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Penulisan laporan penelitian ini dilatar belakangi untuk memberikan rekomendasi bagi PS Ilmu Pemerintahn FHSIP Universitas Terbuka terkait dengan pengembangan Mata kuliah PS Ilmu Pemerintahan yang akan dijadikan Mata kuliah berpraktikum dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran dan profil lulusan yang sudah ditetapkan oleh program studi. Pada tahap awal ini (tahun pertama) penelitian difokuskan pada pengambilan data untuk menentukan model yang sesuai dengan karakteristik mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan. Selanjutnya pada tahun kedua, akan diarahkan kepada penyusunan panduan yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan memenuhi kriteria Mata kuliah berpraktikum seperti yang telah ditetapkan oleh Universitas Terbuka.

Penelitian ini belum dalam tahapan akhir, semoga dalam tahap selanjutnya tim peneliti dapat merampungkan kajian/penelitian ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam melakukan penelitian ini. Tim Peneliti menyadari kekurangan baik mengenai isi maupun teknik penulisannya, untuk itu diharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan kajian ini.

Tangerang Selatan, 30 November 2023  
Ketua Tim Peneliti,



Ayi Karyana  
NIP 196108171992031002

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1      PENDAHULUAN	1
BAB 2      TINJAUAN PUSTAKA	3
BAB 3      TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	10
BAB 4      METODE PENELITIAN	11
BAB 5      HASIL DAN PEMBAHASAN	10
BAB 6      RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	
BAB 7      KESIMPULAN DAN SARAN	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Personalia Penelitian Dosen	
2. Personalia Penelitian Mahasiswa	
3. Pedoman Wawancara	
4. Surat Tugas Penelitian	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tipe-Tipe Pendidikan Jarak Jauh	4
Tabel 2.2	Classification of Online Learning (Sloan Consortium, 2008)	5
Tabel 2.3	<i>Seven Dimensions of Work-Integrated Learning</i>	8
Tabel 5.1	Sebaran Informan Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FHISIP Universitas Terbuka	16
Tabel 5.2	Informan Mahasiswa Dilihat dari sebaran Semester, n = 103	17
Tabel 5.3	Status Pekerjaan Informan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FHISIP UT, n = 103	17
Tabel 5.4	Masa Kerja Informan, Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), n=21	18
Tabel 5.5	Masa Kerja Informan Mahasiswa, Berstatus Pegawai Non PNS, n=25	18
Tabel 5.6	Struktur Kurikulum Program Sarjana FHISIP Program Studi : 71/Ilmu Pemerintahan (Program Sarjana)	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Desain Penelitian Tahap 1	14
Gambar 4.2	Desain Penelitian Tahap 2	15
Gambar 6.1	Desain Penelitian Tahap 2	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Personalia Penelitian Dosen
Lampiran 2	Personalia Penelitian Mahasiswa
Lampiran 3	Pedoman Wawancara
Lampiran 4	Surat Tugas Penelitian

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Penelitian ini terdiri dari dua tahap penelitian, *tahap pertama* (2023) yaitu proses identifikasi model praktikum mata kuliah pada Program Studi (PS) Sarjana Ilmu Pemerintahan. Praktikum mata kuliah ini direncanakan menggunakan praktik pembelajaran digital yang mencakup upaya yang ditempuh mahasiswa dengan mengacu pada prinsip-prinsip kebebasan, kemandirian, keluwesan, keterkinian, kesesuaian, mobilitas, dan efisiensi. Prinsip kebebasan artinya sistem pembelajaran sifatnya demokratis karena dirancang agar bebas dapat diikuti oleh siapa dan dimana saja. Fakta mahasiswa PS Ilmu Pemerintahan sangat heterogen baik dalam kondisi atau karakteristiknya yang meliputi motivasi, kecerdasan, latar belakang pendidikan, kesempatan maupun waktu untuk belajar. Prinsip kemandirian diwujudkan dengan adanya kurikulum atau program pembelajaran yang dipelajari secara mandiri (*independent learning*), belajar perorangan atau belajar kelompok. Prinsip keluwesan memungkinkan mahasiswa untuk fleksibel mengatur jadwal dan kegiatan belajar, mengikuti ujian atau penilaian kemajuan belajar, dan mengakses sumber belajar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kesesuaian menunjukkan pada kurikulum yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa, tuntutan lapangan kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau perkembangan yang terjadi di masyarakat. Prinsip mobilitas memungkinkan mahasiswa belajar dengan cara berpindah tempat sesuai dengan keadaan yang memungkinkan untuk terjadinya proses pembelajaran (Munir: 2017:12-13). Desain yang dibuat akan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran digital yaitu pengajar, pembelajar, pengembang dan termasuk penentu kebijakan untuk membuat aturan dan penguatan desain yang sudah ada. Komponen desain pembelajaran digital meliputi; silabus, orientasi pembelajaran, materi pembelajaran, kalender, site map, dan penilaian.

Salah satu tujuan Program Studi Ilmu Pemerintahan FHSIP UT yaitu “*Menghasilkan sarjana dan/atau praktisi ilmu pemerintahan yang dapat mengimplementasikan konsep dan teori ilmu pemerintahan dalam kegiatan pemerintahan dan memecahkan masalah yang terjadi didalamnya*” dengan capaian pembelajaran “*kemampuan menganalisis persoalan pemerintahan dan membandingkan praktik pemerintahan di suatu negara baik dimensi*

*spasial (antar negara, antar daerah, antar komunitas, dan antar individu) maupun dalam dimensi waktu”* untuk mencapai tujuan dan capaian pembelajaran lulusan tersebut dapat tercapai dengan di selenggarakannya praktikum mata kuliah dalam pelaksanaan pembelajarannya, karena semua elemen penyelenggara pendidikan diantaranya Program Studi, FHSIP UT, UT Daerah, dan Kelompok Belajar Mahasiswa (Pokjar) mempunyai tujuan yang sama, begitu pula di perkuat dari pihak mahasiswa secara individual yang menginginkan adanya praktik dari teori/konsep yang mereka terima.

Untuk mendapatkan model praktikum yang tepat pada tahap pertama ini diperlukan penelitian terlebih dahulu, penelitian ini dituangkan dalam judul “Model Praktikum Mata Kuliah Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FHSIP Universitas Terbuka.”

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian dan Tipe-Tipe Pendidikan Jarak Jauh**

Pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) bukanlah konsep baru, tetapi dalam beberapa tahun terakhir telah diasumsikan dalam bentuk yang baru. Sekarang, PTTJJ adalah salah satu bentuk yang paling cepat berkembang dalam bidang pendidikan tinggi melalui media internet atau video conference (Ashby, 2002). Dalam istilah umum sering diistilahkan pendidikan jarak jauh atau disebut *distance education*, *distance learning* atau *online learning* merupakan suatu disiplin yang memiliki berbagai penelitian yang memadai.

Dalam sistem pendidikan jarak jauh, informasi dan komunikasi dipertukarkan melalui media cetak atau media komunikasi elektronik. Hal ini dikemukakan oleh Keegan (1980) sebagai berikut: *Distance education is a planned learning experience or method of instruction characterized by quasipermanent separation of the instructor and learners. Within a distance education system, information and communication are exchanged through print or electronic communications media.* UNESCO mendefinisikan pendidikan jarak jauh sebagai “*an educational process and system in which all or a significant proportion of the teaching is carried out by someone or something removed in space and time from the learner.*” Lebih lanjut dikemukakan bahwa persyaratan pendidikan jarak jauh sebagai berikut:

- 1) *Structured planning*
- 2) *Well-designed courses*
- 3) *Special instructional techniques*
- 4) *Methods of communication by electronic and other technologies.*

Pendidikan jarak jauh juga merupakan pendekatan yang luas ditandai dengan tingginya variasi-variasi tersebut meliputi jenis media atau teknologi yang digunakan (cetak, radio, komputer); sifat pembelajaran (workshop, seminar, program gelar, suplemen untuk kelas tradisional, tingkat dukungan); pengaturan kelembagaan; topik yang dibahas; dan tingkat dukungan interaktivitas (*face-to-face*, online, dicampur, tidak ada) (Fillip, 2001). Tabel 1 berikut mengemukakan mengenai tipe-tipe pendidikan jarak jauh beserta contohnya.

**Tabel 1. Tipe-Tipe Pendidikan Jarak Jauh**

<i>Types of Distance</i>	<i>Education Examples</i>
<i>Correspondence model</i>	<i>Print</i>
<i>Audio-based models</i>	<i>Broadcast: IRI</i> <i>Narrowcast: IAI (via audio tape or CDs)</i> <i>Two-way radio</i> <i>Audio conferencing and telephon</i> <i>Broadcast radio</i>
<i>Televsual models</i>	<i>Broadcast television (educational and instructional)</i> <i>Videoconferencing</i> <i>Video</i>
<i>Computer-based multimedia models</i>	<i>Interactive video (disc and tape)</i> <i>CD-ROMs</i> <i>Digital videodiscs (DVDs/VCDs)</i> <i>Interactive multimedia</i>
<i>Web-based models</i>	<i>Computer-mediated communication</i> <i>Internet-based access to World Wide Web resources</i> <i>Online courses (e-learning)</i> <i>Online conferences (webcasts and webinars)</i> <i>Virtual classes/schools (cyber schools) and universities</i>
<i>Mobile models</i>	<i>Hand-held devices</i> <i>Portable media players (podcasting)</i> <i>Cell phones and smart phones</i> <i>Tablets</i> <i>E-readers</i>

Sumber: Fillip (2001) dikutip oleh Education Development Center (2011)

### **B. Web-based Models (Online Learning) untuk Pendidikan Jarak Jauh**

Salah satu model paling cepat berkembang dari pendidikan jarak jauh adalah berbasis web atau online learning (juga disebut sebagai pembelajaran virtual atau *e-learning*). Model ini berkembang di negara-negara seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Singapura, Jepang, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan sebagian besar negara Eropa di mana terdapat akses internet yang tinggi, dan keterampilan teknologi secara luas disebarkan. Namun Web-based Models (*Online Learning*) semakin banyak di berbagai negara-negara meskipun prasyarat akses internet adalah sebagian besar tidak ada.

Pendekatan berbasis web (*online learning*) untuk pembelajaran mencakup sejumlah praktik. Model ini tidak hanya mencakup komunikasi melalui komputer (seperti *e-mail*, *e-list*, dan *bulletin board systems*) tetapi juga tutorial online, komunitas online, e-mentoring, webinar, webcast, dan telecollaboration dan telereasearch. Dalam tabel. 2 berikut adalah klasifikasi dari Web-based Models (Online Learning) berdasarkan Sloan Consortium (2008).

**Tabel 2. Classification of Online Learning (Sloan Consortium, 2008)**

<i>Proportion of content delivered online</i>	<i>Type of course</i>	<i>Description</i>
0%	<i>Traditional</i>	<i>Course uses no online technology Content is delivered in written, oral, or audiovisual format</i>
1-29%	<i>Web-facilitated</i>	<i>Course uses web-based technology to facilitate what is essentially a face to face course Course might use LMS to post syllabus and assignments</i>
30-79%	<i>Blended/hybrid</i>	<i>Course blends online and face to face settings Substantial proportion of the content is delivered online Course typically uses online discussions and has some face to face meetings</i>
80%	<i>Online</i>	<i>Course delivers the vast bulk of content online Course typically has no face to face meetings</i>

Sumber: Sloan Consortium (2008) dikutip oleh Education Development Center (2011)

Berdasarkan klasifikasi Sloan Consortium (2008), pembelajaran secara online menggunakan paling banyak media secara online (di atas 80 persen), terdiri dari konten dan interaksi melalui Internet. Dalam pembelajaran secara "*Blended*" atau "*hybrid*" berkisar antara 30 sampai 79 persen secara online. Meskipun komponen substansial dari pembelajaran terjadi dalam pengaturan tatap muka. Untuk model *Web-facilitated* memiliki beberapa komponen pembelajaran online, namun sebagian besar interaksi adalah tatap muka. Contohnya adalah program pendidikan di mana beberapa konten ditempatkan online, tetapi sebagian besar proses pembelajaran adalah di tempat dan terikat waktu dengan instruktur/tutor dan siswa/peserta.

### C. Pengertian dan Model-Model Praktikum

Praktik adalah latihan keterampilan penerapan teori dengan pengawasan langsung menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimum. Praktikum adalah tugas terstruktur dan berhubungan dengan validasi fakta atau hubungan antar fakta, yang mendukung capaian pembelajaran secara utuh sesuai dengan persyaratan dalam kurikulum (Panduan Pelaksanaan PJJ 2016).

Seagall (2002) mengemukakan bahwa praktikum adalah aspek yang paling berharga dari program pendidikan. Zeichner (1996) menyarankan bahwa praktikum harus menjadi waktu untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Komponen praktikum merupakan bagian integral dari pendidikan guru (Cohen & Ball, 1999; Schulz, 2005). Penempatan praktikum sangat penting untuk mempromosikan kohesi antara teori dan praktik dalam pendidikan (Falkenberg & Smits, 2010; Le Cornu & Ewing, 2008). Penempatan praktikum, baik pengaturan tradisional dan non-tradisional, menumbuhkan kesempatan peserta untuk bekerja untuk belajar serta belajar bekerja (Cooper et al., 2010).

Higher Education Quality Council of Ontario (2014) mengemukakan mengenai beberapa model praktikum di Ontario. Secara tradisional, pengajar menyelesaikan praktikum mereka di ruang kelas sekolah untuk periode waktu yang ditentukan. Untuk mengenali kebutuhan calon pengajar, terdapat proyek yang menempatkan calon pengajar dengan seorang guru asosiasi di sebuah sekolah yang didanai publik untuk mengaplikasikan beberapa model seperti rekan bimbingan (*peer mentorship*), *alternative service learning* dan *international practicum*.

Beberapa hal terkait dengan ketiga model praktikum tersebut adalah sebagai berikut: *model pertama* adalah *Peer mentorship* (pada tahun pertama), yang selanjutnya akan menciptakan mentor baru (pada tahun kedua). Metode ini mengembangkan ajaran kolaboratif dan mengembangkan keterampilan dari calon mentor. *Model kedua*, adalah *alternative service learning*, berupa penempatan di lembaga masyarakat dan di lingkungan non pembelajaran. Lingkungan ini diatur oleh mentor dengan tujuan untuk menerapkan keterampilan belajar dan terlibat dengan mitra masyarakat dan budaya dalam pendidikan. *Model ketiga* adalah *international practicum*, berupa penempatan praktikum internasional di luar negeri dengan fasilitasi fakultas. Model ketiga ini dilakukan untuk menciptakan kesadaran global dan memberikan kesempatan untuk pengembangan pedagogis dan keterampilan berbahasa.

#### **D. Dimensi Model Pembelajaran Kerja Terintegrasi (*A Conceptual Framework for Work-Integrated Learning*) dalam Pengembangan Praktikum**

Model Pembelajaran Kerja Terintegrasi (*A Conceptual Framework for Work-Integrated Learning*) adalah sebuah model yang digunakan untuk menganalisis dan mengatasi kesenjangan dalam literatur dan untuk menilai efektivitas model praktikum yang inovatif. Model ini meneliti persepsi calon pengajar mengenai manfaat dan tantangan yang berkaitan dengan partisipasi dalam praktikum. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk literatur dalam hal mengeksplorasi struktur yang berbeda. Model ini juga meneliti model praktikum termasuk fasilitasi fakultas di lokasi berbeda. Temuan dari studi yang saling terkait ini memberikan kesempatan untuk mensintesis manfaat yang dirasakan dan tantangan dari pengalaman praktikum dalam kerangka konseptual yang menggambarkan dimensi model pembelajaran kerja terintegrasi.

Model Pembelajaran Kerja Terintegrasi ini terdiri dari 7 (tujuh) dimensi yang menyelaraskan dengan komponen praktikum. Cooper et al. (2010) mengusulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan model pembelajaran kerja terpadu perlu mencakup semua tujuh dimensi. Penting untuk dicatat bahwa tujuh dimensi tidak dianggap hirarkis atau saling eksklusif. Dimensi dari Model Pembelajaran Kerja Terintegrasi digambarkan dalam table 3. Dapat disimpulkan terdapat 7 (tujuh) dimensi dari model Dimensi Model Pembelajaran Kerja Terintegrasi yaitu tujuan, *context*: tempat kerja, integrasi, kurikulum, pembelajaran, kemitraan, dan dukungan. *Dimensi tujuan*, mendefinisikan hasil yang diinginkan dari pengalaman bagi semua kelompok pemangku kepentingan. Tujuan dan harapan untuk semua *stakeholders* harus diartikulasikan dalam tujuan pengalaman yang berhubungan dengan pekerjaan. *Dimensi kedua adalah konteks*, tempat kerja. Dimensi ini berpusat pada komunitas praktik mencakup juga mentoring dan pembinaan. *Dimensi ketiga adalah integrasi*, merupakan hubungan antara teori dan praktik. Integrasi adalah proses melalui dialog, refleksi kritis, tutorial dan bekerja diakses baik di tempat kerja dan lembaga pembelajaran. *Dimensi keempat adalah kurikulum*, yang mencakup belajar di tempat kerja dan kebutuhan untuk menanamkan pembelajaran melalui institusi dan kurikulum berbasis pekerjaan. Ini pengakuan

**Tabel 3. Seven Dimensions of Work-Integrated Learning**

Dimension	Description
Purpose	Intended outcome for all stakeholders. Expectations and goals (Hasil yang diharapkan untuk semua pemangku kepentingan. Harapan dan tujuan)
Context : the workplace	Diverse settings. Within a community of practice (Beragam pengaturan. Dalam komunitas praktik)
Integration	A learning process through dialogue, reflection, tutorials and accessible work. A two way application of theory and practice (Proses pembelajaran melalui dialog, refleksi, tutorial dan karya yang mudah diakses. Sebuah aplikasi dua arah teori dan praktik).
Curriculum	Functional knowledge integrated with declarative knowledge. Alignment of learning objectives with assessment. Workplace curriculum is valued (Pengetahuan fungsional terintegrasi dengan pengetahuan deklaratif. Penyelarasan tujuan pembelajaran dengan penilaian. Kurikulum tempat kerja dihargai).
Learning	Experiential and situated learning. transformative process that leads to growth in understanding of theory and personal/professional identity. Opportunities for observation, review and reflection. (Pembelajaran eksperiensial dan terletak. Proses transformatif yang mengarah pada pertumbuhan pemahaman teori dan identitas pribadi/profesional. Peluang untuk observasi, review dan refleksi)
Partnerships	Multiple stakeholders at various levels in numerous contexts. Support for partnerships on an institutional level (Berbagai pemangku kepentingan di berbagai tingkatan dalam berbagai konteks. Dukungan untuk kemitraan pada tingkat kelembagaan).
Support	Ongoing assistance and guidance for interns, supervisors and organizations. Practical, administrative, educational and emotional component. (Bantuan dan bimbingan berkelanjutan untuk pekerja magang, supervisor dan organisasi. Komponen praktis, administrasi, pendidikan dan emosional).

Sumber: Cooper et al. (2010) dikutip oleh Higher Education Quality Council of Ontario (2014)

secara teori dan praktik kerja yang diintegrasikan ke dalam pengalaman. *Dimensi kelima adalah belajar dan dipandu oleh hasil belajar (outcomes)* secara keseluruhan dan penilaian yang selaras dengan hasil dan kegiatan terkait. Belajar melibatkan proses transformatif yang mengarah ke perubahan dalam pemahaman, penafsiran teori dengan praktik dan pertumbuhan

disposisi pribadi. Belajar termasuk peluang untuk observasi, review dan refleksi untuk pelajar, diikuti dengan membuat koneksi dengan pengalaman. *Dimensi keenam adalah kemitraan* dan melibatkan integrasi beberapa pemangku kepentingan di tingkat yang berbeda dalam konteks yang berbeda-beda, semua dengan tujuan bersama, kemitraan yang kuat dan tujuan bersama menghasilkan proses praktikum lebih efektif. *Dimensi ketujuh adalah dukungan* yang diberikan kepada siswa, organisasi dan mentor untuk mengakomodasi beragam kebutuhan termasuk komponen praktis, administrasi, pendidikan dan emosional.

## **BAB 3**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mendesain model praktikum mata kuliah pada program studi ilmu pemerintahan yang tepat, sehingga dengan model praktikum mata kuliah yang tepat sesuai karakteristik mahasiswa dapat diterapkan pada program Ilmu Pemerintahan FHISIP Universitas Terbuka.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian maka manfaat penelitian dapat disebutkan sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis Program Studi (PS) Ilmu Pemerintahan.

Untuk merancang mata kuliah berpraktikum mata kuliah (antara lain: Manajemen Pelayanan Umum, Sistem Pemerintahan Desa, Sistem Pemerintahan Daerah, Sistem Pemerintahan Indonesia, Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota, Pembangunan Sosial dan Pembangunan) yang diajarkan dan terdapat dalam struktur kurikulum di Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan ilmu pemerintahan.

2) Manfaat Praktis PS Ilmu Pemerintahan.

a. Sebagai masukan bagi Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan FHISIP Universitas Terbuka.

b. Sebagai rujukan implementasi kegiatan dalam penyelenggaraan praktikum khususnya untuk mata kuliah

berpraktikum pada program studi ilmu pemerintahan.

#### **C. Luaran Penelitian**

Penelitian ini ditargetkan menghasilkan luaran berupa rekomendasi praktikum mata kuliah bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FHISIP Universitas Terbuka sebagai matakuliah berpraktikum.

## **BAB 4 METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memahami berbagai aspek yang ada dalam Model Praktikum Matakuliah Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FHSIP Universitas Terbuka. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini dapat menghasikan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk penelitian tentang Model Praktikum Mata kuliah Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FHSIP Universitas Terbuka yang berkaitan dengan model praktikum.

Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku dalam Model Praktikum Mata kuliah Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FHSIP Universitas Terbuka yang dapat diamati dari suatu kelompok yang berwenang guna penentuan model praktikum dalam suatu *setting* kontek tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

Penggunaan pendekatan kualitatif ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Creswell (1998:15) bahwa: "*Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The research builds a complex, holsistic pictures, analyzes words, reports detailed views of informants, and conducted the study in natural setting.*"

Pada penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data. Sedangkan fokus penelitian ada pada peran dan pengalaman informan dan cara mereka memandang metode dan model praktikum administrasi perkantoran. Peneliti juga lebih menekankan pada objektivitas dan kejujuran yang diwujudkan dengan menjelaskan tujuan

penelitian kepada informan. Informasi yang didapat dari observasi langsung berupa catatan wawancara dan rekaman wawancara.

Tehnik pengumpulan data meliputi studi literatur menjadi salah satu sumber data yang penting, karena studi literatur adalah acuan dari penelitian dan alat yang digunakan untuk mempertajam pembahasan dalam penelitian. Studi literatur dalam penelitian dilakukan terhadap berbagai jenis peraturan, penelitian, buku-buku, jurnal dan berbagai dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

## **B. Objek dan Informan Penelitian**

Informan yang dipilih dalam penelitian kualitatif harus memiliki informasi yang cukup mengenai fenomena yang akan diteliti sehingga peneliti dapat memahami mengenai fenomena yang terjadi berkaitan dengan objek penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait. Jadi objek utama penelitian ini adalah:

1. Pimpinan Fakultas, Universitas terkait dengan akademik di Universitas Terbuka, untuk mendapatkan informasi mengenai kesiapan dalam perubahan kurikulum serta legalisasi kerjasama dengan instansi pemerintah dan lainnya yang menjadi tempat mahasiswa PS. Ilmu Pemerintahan melaksanakan praktik mata kuliah (kajian dokumen sesuai dengan tujuan penelitian).
2. UT Daerah yang menjadi tempat penelitian, dalam hal ini adalah UT Pontianak, UT Palembang, UT Pekanbaru, UT Bandung, UT Surabaya, dan UT Daerah lainnya yang sesuai dengan tujuan penelitian dan terdapat mahasiswa PS Ilmu Pemerintahan.
3. Instansi Pemerintah Pusat yaitu lembaga yang memberikan legalisasi sertifikat keahlian dan lembaga yang mempunyai peran penting dalam pendidikan dan latihan guna mendapat informasi untuk materi praktikum mata kuliah PS Ilmu Pemerintahan (kajian dokumen sesuai dengan tujuan penelitian).
4. Pemerintah Daerah/Kota dan lainnya, untuk menelusuri kesiapan dalam menerima mahasiswa PS Ilmu Pemerintahan FHISIP UT dalam melaksanakan praktikum mata kuliah.

5. Mahasiswa dan alumni PS Ilmu Pemerintahan FHISIP UT sebagai informan berdasarkan rumus Slovin direncanakan berjumlah 146 orang mahasiswa, 81 orang alumni dan 8 orang pengguna lulusan.

### **C. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Teknik pemeriksaan keabsahan data, akan dilakukan peneliti dengan membuat langkah-langkah verifikasi untuk penafsiran data, yaitu dengan triangulasi informasi (Creswell, 1998:213). Triangulasi merupakan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Langkah yang ditempuh peneliti yaitu mencari konvergensi informasi dari data yang terkumpul dengan menghubungkan secara langsung situasi data yang berkembang dalam model praktikum yang berkaitan dengan model praktikum mata kuliah pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FHISIP Universitas Terbuka.

Analisis data pada umumnya dilakukan setelah tahap pengumpulan data berakhir. Namun pada prinsipnya proses analisis data dilakukan sejak memasuki lapangan penelitian yang meliputi upaya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuan-temuan yang berdasarkan permasalahan yang diteliti yaitu model praktikum mata kuliah.

Dengan demikian aktivitas dalam analisis data yang peneliti lakukan atas dasar dari pendapatnya Creswell (2009), berikut adalah langkah-langkah analisis data yang dilakukan oleh penulis:

1. Mempersiapkan data untuk dianalisis. Pada tahap ini, penulis membuat transkrip hasil wawancara, dimana hasil wawancara tersebut dituangkan dalam sebuah tulisan/catatan sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh informan.
2. Membaca secara keseluruhan data, baik transkrip wawancara maupun dokumen yang sesuai dengan inti pembicaraan dari informan, guna mendapatkan inti atau kunci utama informasi yang dikemukakan oleh informan.
3. Melakukan Pengkodean. Dalam tahap pengkodean ini penulis mengambil transkrip wawancara dan dokumen yang dikumpulkan selama pengumpulan data, membuat paragraf dan dokumen ke dalam kategori tema tertentu. Setiap data yang diperoleh diberi

kode, lalu data direduksi dengan membaginya kedalam kategori. Mengacu pada Creswell (2009:186), pengkategorian (coding) kepada tema dilakukan berdasarkan :

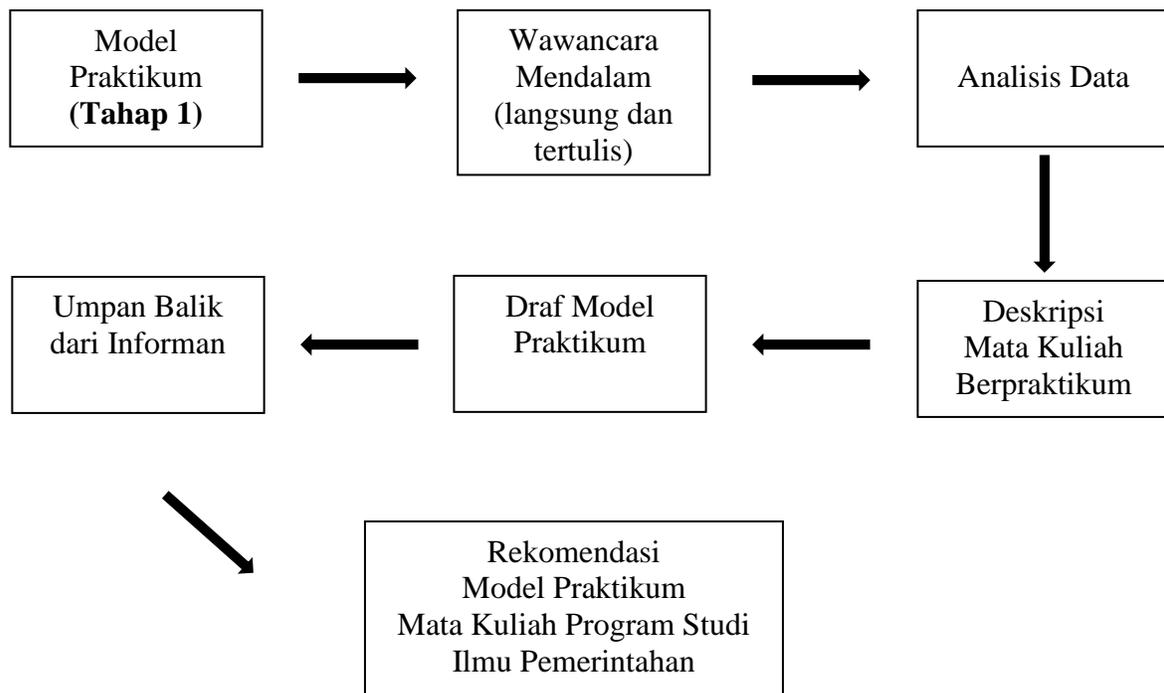
- a. Kode pada tema yang penulis harapkan untuk ditemukan, berdasarkan pada literatur yang telah disusun sebelumnya.
  - b. Kode pada tema yang merupakan aspek yang baru dalam penelitian.
  - c. Kelompok yang merupakan reduksi data.
4. Berdasarkan hasil coding, dihasilkan tema sebagai temuan utama dalam studi kualitatif dan digunakan untuk membuat bagian judul sebagai temuan dari studi.
  5. Membuat kalimat (narasi) yang menggambarkan tema dan memasukkan tema-tema ini kedalam kategori-kategori tertentu. Mengelompokkan tema-tema yang saling berhubungan dan membuat garis antar kategori untuk menunjukkan keterkaitannya.
  6. Langkah terakhir membuat interpretasi atau makna dari data. Interpretasi ini juga bisa berasal dari perbandingan antara temuan dengan informasi yang diperoleh dari literatur atau teori.

#### D. Bagan Alir Penelitian

Alir penelitian yang dilaksanakan dapat diilustrasikan dalam bagan berikut:

**Penelitian tahap 1 (dilaksanakan pada tahun pertama)**

**Gambar 4.1  
Desain Penelitian Tahap 1**

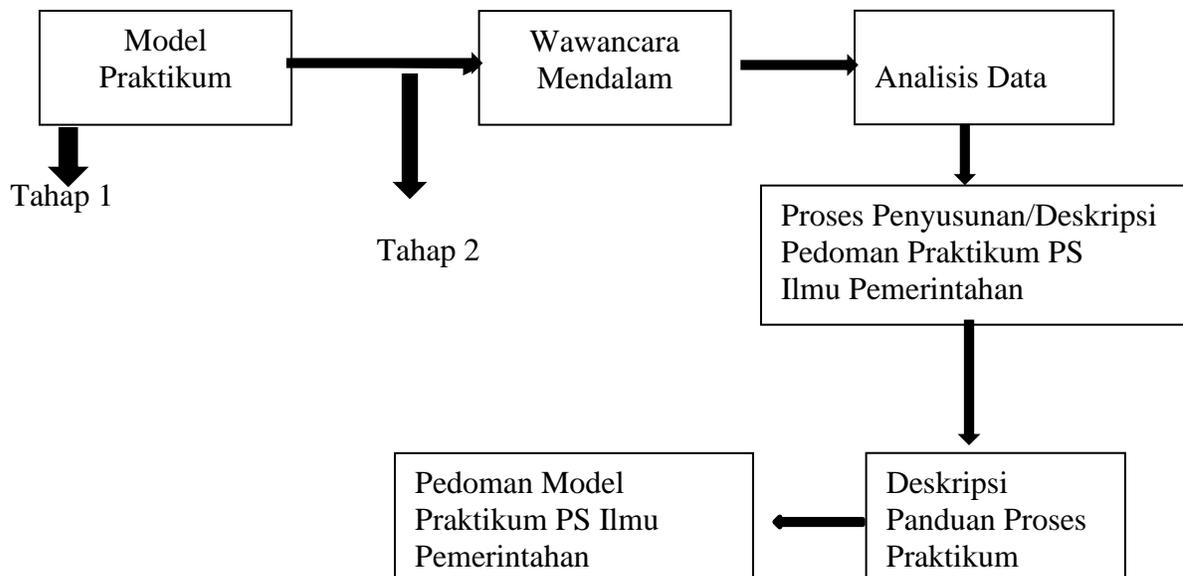


Pada tahun kedua, metode yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tehnik pengumpulan data wawancara mendalam dengan informan. Wawancara mendalam direncanakan akan dilakukan dengan Ketua Program Studi Perguruan Tinggi Penyelenggara Praktikum Mata kuliah PS Ilmu Pemerintahan, Organisasi Profesi dan lainnya. Obyek yang diamati adalah praktik mata kuliah pada struktur kurikulum PS Ilmu Pemerintahan.

Temuan tahun kedua adalah hasil akhir dari semua proses penelitian yaitu Model Praktikum Mata kuliah Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FHSIP Universitas Terbuka berdasarkan temuan penelitian tahun pertama dan tahun kedua.

**Penelitian tahap 2 (dilaksanakan pada tahun kedua).**

**Gambar 4.2  
Desain Penelitian Tahap 2**



### **E. Luaran Penelitian**

Penelitian ini ditargetkan menghasilkan luaran berupa rekomendasi praktikum matakuliah bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FHSIP Universitas Terbuka sebagai matakuliah berpraktikum.

Hasil akhir penelitian ini akan menjadi dokumen kebijakan untuk menghasilkan luaran berupa panduan model praktikum Mata kuliah Program Studi Ilmu Pemerintahan FHSIP Universitas Terbuka sebagai mata kuliah berpraktikum.

## **BAB 5.** **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **5.1 Deskripsi objek Penelitian**

#### **5.1.1 Gambaran Umum Mahasiswa dan Alumni**

Mahasiswa dalam penelitian ini yaitu mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FHSIP Universitas Terbuka, yang mengikuti kuliah tatap muka (TTM) bertempat di lokasi UT Daerah yaitu di UT Yogyakarta, UT Bandung, UT Pekanbaru, UT Surabaya, UT Palembang, dan UT Pontianak serta UT Daerah lainnya. Mahasiswa yang dijadikan sasaran penelitian ini adalah mahasiswa yang mengikuti tutorial tatap muka di semester 2023.1 dan 2023.2, pada berbagai mata kuliah pada kelas Program Studi Ilmu Pemerintahan. Mahasiswa Tutorial Tatap Muka di UT Bandung yang berhasil di wawancara langsung 2 (dua) mahasiswa dan tertulis berjumlah 24 orang, dengan alasan ada yang tertulis mengingat terbatasnya waktu dan pada tanggal yang sama juga harus melakukan wawancara secara langsung (*in dept interview*) pada 3 (tiga) orang pakar. Mahasiswa UT Yogyakarta sejumlah 21 orang yang mengisi dokumen tertulis. Kondisi mahasiswa UT Surabaya yang menyebar dan tidak adanya kelas tatap muka, tim peneliti melakukan wawancara secara tertulis kepada mahasiswa Ilmu Pemerintahan sebanyak 5 orang. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan di UT Palembang sebanyak 6 orang serta mahasiswa Ilmu Pemerintahan di UT Pekanbaru sebanyak 10 orang. Alat yang digunakan dalam mendapatkan data dan informasi pada mahasiswa yaitu dengan wawancara langsung dan wawancara tertulis/dokumen tertulis. Informan mahasiswa secara keseluruhan yang berhasil diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah 103 mahasiswa (72% dari yang telah ditrencanakan), dapat dilihat pada tabel 5.1 yaitu:

Tabel 5.1  
Sebaran Informan Mahasiswa PS Ilmu Pemerintahan  
Yang di Wawancarai

<b>Lokasi Responden</b>	<b>Jumlah Responden Mahasiswa</b>
<b>Yogyakarta</b>	21 Orang
<b>Bandung</b>	26 Orang
<b>Pekanbaru</b>	11 Orang
<b>Surabaya</b>	5 Orang
<b>Palembang</b>	20 Orang
<b>Pontianak/Sintang</b>	16 Orang

<b>Banda Aceh, Jakarta, Bogor, Malang</b>	4 Orang
<b>Total</b>	103 Orang

Sumber : Hasil Penelitian, November 2023

Mahasiswa yang peneliti jadikan sasaran utama penelitian yaitu mahasiswa yang tersebar pada semester 5 (lima) sampai dengan semester 8 (delapan). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.2 sebagai berikut :

Tabel 5.2  
Informan Mahasiswa Dilihat dari sebaran Semester, n = 103

<b>Semester</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase (%)</b>
<b>5</b>	32	31%
<b>6</b>	21	21%
<b>7</b>	28	27%
<b>8</b>	22	21%
<b>Total</b>	103	100%

Sumber : Hasil Penelitian, November 2023

Mahasiswa dalam penelitian ini sebagian besar adalah berstatus sebagai pegawai, baik Pegawai Negeri Sipil/ASN, Pegawai Non PNS, dan bekerja pada perusahaan swasta/lainnya, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.3 status pekerjaan dalam penelitian ini sangat penting di ketahui guna penajaman analisis untuk menentukan model praktikum di PS Ilmu Pemerintahan. Sebaran status pekerjaan mahasiswa sebagai berikut :

Tabel 5.3  
Status Pekerjaan Mahasiswa PS Ilmu Pemerintahan FHSIP UT, n = 103

<b>Status Pekerjaan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>Pegawai Negeri Sipil (PNS)</b>	33	32%
<b>Pegawai Non PNS</b>	33	32%
<b>Tidak Bekerja</b>	32	31%
<b>Tidak Mengisi Status Pekerjaan</b>	5	5%
<b>Total</b>	103	100%

Sumber: Hasil Penelitian, November 2023

Dari data tersebut mahasiswa yang status bekerja 66 (64%), data menunjukkan bahwa mahasiswa sebagian besar berstatus pekerjaannya adalah bekerja. Dari data tersebut mahasiswa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ASN berjumlah 33 orang dan pegawai Non PNS/ASN berjumlah 33 orang. Untuk lebih spesifik jumlah mahasiswa sesuai

dengan masa kerja di setiap Status Pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 5.4, Tabel 5.5, dan Tabel 5.6 sebagai berikut :

Tabel 5.4  
Masa Kerja Mahasiswa Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), n=33

Masa Kerja	Frekuensi	Presentase %
<b>6 Bulan - 5 Tahun</b>	13	40%
<b>6 Tahun - 10 Tahun</b>	5	15%
<b>11 Tahun – 15 Tahun</b>	3	9%
<b>16 Tahun – 20 Tahun</b>	2	6%
<b>21 Tahun – 25 Tahun</b>	1	3%
<b>26 Tahun - 28 Tahun</b>	1	3%
<b>Tidak menulis Masa kerja</b>	8	24%
<b>Total</b>	33	100 %

Sumber : Hasil Penelitian, November 2023

Dari data terlihat, mahasiswa berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam penelitian ini paling banyak ada di bawah lima (5) tahun mencapai 40%, selanjutnya masa kerja mahasiswa dari status pekerjaan Pegawai Non PNS digambarkan pada Tabel 5.6, sebagai berikut:

Tabel 5.5  
Masa Kerja Mahasiswa Berstatus Pegawai Non PNS, n=33

Masa Kerja	Frekuensi	Presentase %
<b>6 Bulan - 5 Tahun</b>	14	43%
<b>6 Tahun - 10 Tahun</b>	9	27%
<b>11 Tahun - 20 Tahun</b>	6	18%
<b>Tidak menulis Masa kerja</b>	4	12%
<b>Total</b>	33	100%

Sumber : Hasil Penelitian, November 2023

Dari data terlihat mahasiswa berstatus pegawai Non PNS dalam penelitian ini paling banyak ada dalam kisaran 5 tahun masa kerja yang mencapai 43%, data ini sama dengan data mahasiswa yang berstatus PNS/ASN, masa kerja status pekerjaan PNS/ASN berada dalam kisaran 5 tahun masa kerja.

Dari data terlihat mahasiswa sebagian besar berstatus pekerjaan yang masa kerjanya dibawah lima tahun dengan jumlah mahasiswa 27 orang, dengan masa kerja pada instansi

yang mereka tempati menunjukkan dan memberikan informasi pengalaman bekerja yang perlu dimatangkan dengan melakukan praktikum mata kuliah.

Informan dari alumni UT yang menjadi partisipan penelitian ini berasal dari Kabupaten Sintang yang berada di bawah koordinasi UT Pontianak, UT Palembang dan UT Pekanbaru, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait mata kuliah yang konsep/teorinya perlu di praktikumkan. Peningkatan layanan bantuan belajar bermutu kepada mahasiswa khususnya terkait dengan mata kuliah berpraktikum. Alat yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi dari UT Daerah yaitu melalui wawancara langsung (*by phone*) di dukung dengan dokumen tertulis.

### **5.1.2 Gambaran Umum Informan Pokjar dan UT Daerah**

Pokjar yang dijadikan sasaran yaitu pengurus kelompok belajar (Pokjar) yang ada di wilayah UT Daerah pinggiran yaitu di Pokjar Sintang, berada di bawah koordinasi UT Pontianak, dan Pokjar Yogyakarta yang berada daerah perkotaan pada wilayah kerja UT Yogyakarta. Kami juga melakukan wawancara baik dengan Ketua maupun Pengurus Pokjar, yaitu Pokjar Madiun di UT Surabaya, Pokjar Air Kumbang UT Palembang dan Bagansiapiapi UT Pekanbaru.

Pengurus disini adalah mitra di luar struktur UT yang secara manajerial mengurus kelompok belajar yang mempunyai tugas memberikan layanan memberikan bantuan akademik maupun non akademik kepada mahasiswa, dengan memberikan pelayanan untuk mempermudah administrasi akademik mahasiswa mendapatkan layanan bantuan belajar dan dapat memberikan informasi yang tepat di bawah koordinasi dan bimbingan UT Daerah. Alat yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi dari pengurus pokjar yaitu melalui wawancara langsung (*by phone*) dengan pengurus pokjar.

Universitas Terbuka Daerah (UT Daerah) adalah UT di daerah sebagai tempat mahasiswa untuk melakukan kegiatan administratif akademik dan kegiatan akademik. Untuk kegiatan sehari-hari, UT Daerah mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan operasional belajar jarak jauh.

Informan UT Daerah yang di jadikan sasaran penelitian ini yaitu UT Bandung, UT Yogyakarta, UT Surabaya, UT Palembang dan UT Pekanbaru dengan tujuan untuk

mendapatkan informasi pengelolaan mata kuliah berpraktikum. Berdasarkan pengalamannya dalam memberikan layanan bantuan belajar bermutu kepada mahasiswa, dapat memberikan informasi yang akurat, khususnya terkait dengan mata kuliah berpraktikum. Alat yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi dari UT Daerah yaitu melalui wawancara langsung dengan para manajer dan penanggung jawab praktikum yang mengkoordinasikan mata kuliah praktikum di UT Daerah tersebut.

### **5.1.3 Gambaran Umum Informan Pakar dan Instansi**

Pengambilan data dan wawancara penelitian dari pakar pada tahap I (2023) ini berasal dari perguruan tinggi dan instansi. Dari perguruan tinggi tim peneliti berhasil melakukan wawancara langsung dengan 3 (tiga) pakar yang menjabat sebagai Ketua Program Studi masing-masing program sarjana terapan administrasi pemerintahan dan program studi administrasi keuangan publik FISIP Universitas Padjadjaran Bandung, serta secara tertulis dengan Ketua Program Studi Terapan Kearsipan Digital FISIP Universitas Padjadjaran Bandung. Sedangkan dari instansi, melakukan wawancara tertulis/dokumen masing-masing berasal dari Dinas Pendidikan Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Bappeda Kota Padang Panjang, Bappelitbangda Kabupaten Muko-Muko, BPSDMD Sulawesi Barat, Pemkab Seluma, Direktorat Jenderal Pajak, Bappeda Kabupaten Kudus, dan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Selain itu, kami juga melakukan *Focus Group Discussion (FGD)* pada tanggal 25-27 November 2023 di Hotel Mercure TB. Simatupang Jakarta Selatan. FGD ini mengundang 3 Pakar yaitu Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Veteran Negeri Jakarta, Mantan Dekan FISIP Universitas 17 Agustus dan Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan yang bekerja di Direktorat Kerja Sama dan Hubungan Internasional (DPKS) Universitas Terbuka.

### **5.2 Deskripsi Hasil dan Pembahasan**

Untuk menganalisis Model Praktikum Mata kuliah pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FHSIP Universitas Terbuka dengan menggunakan teori dari Cooper et al., 2010 mengenai Model Pembelajaran Kerja Terintegrasi yaitu Tujuan, Konteks, Integrasi, Kurikulum, Learning, Kemitraan, dan Dukungan.

### **5.2.1 Deskripsi Telaah *Dimensi Tujuan***

Program Studi Ilmu Pemerintahan (PS IPEM) Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka (FHISIP-UT) berdiri berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional Nomor 251/DIKTI/Kep/1996 tanggal 11 Juli 1996 dan saat didirikan bernaung di bawah jurusan Ilmu Administrasi (JIA). PS Ilmu Pemerintahan mulai menerima mahasiswa baru sejak tahun 1999. Program studi ini menyelenggarakan pendidikan di bidang Ilmu Pemerintahan pada jenjang Strata 1/Program Sarjana, dengan menggunakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ). Istilah terbuka dalam sistem pendidikan Universitas Terbuka mengandung makna bahwa setiap orang dapat menjadi mahasiswa UT tanpa pembatasan. Tidak ada batasan tahun kelulusan ijazah Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA)/sederajat, usia, lama studi, maupun tempat tinggal. Batasan yang ada, setiap mahasiswa UT harus sudah menamatkan jenjang pendidikan menengah atas (SMA atau sederajat) yang dibuktikan dengan ijazah yang sah. Istilah jarak jauh yaitu adanya jarak antara yang belajar dan yang mengajar. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) adalah kegiatan pendidikan formal antara peserta didik dan pengajar yang berada di lokasi berbeda dan diajarkan dari jarak jauh tanpa ruang kelas secara fisik. IGAK Wardani mengulas secara rinci tentang ciri pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ), dijelaskannya Pendidikan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ) mempunyai karakteristik yang unik, yang membedakannya dari perguruan tinggi biasa (konvensional). Perbedaan tersebut menyangkut berbagai aspek, satu di antaranya adalah dalam sistem pembelajaran. Jika perguruan tinggi konvensional lebih menekankan pembelajaran dalam bentuk tatap muka, maka sesuai dengan hakikatnya, PTTJJ melakukan pembelajaran dengan jarak jauh. Sistem pembelajaran jarak jauh didukung oleh berbagai komponen seperti bahan belajar pokok atau utama, bahan belajar pendukung, dan tutorial. (<http://simpen.lppm.ut.ac.id/ptjj/PTJJ%20Vol%201.2%20september%202000/12wardani.htm>).

Program Studi Ilmu Pemerintahan bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan tinggi berkualitas di bidang ilmu pemerintahan bagi masyarakat. Untuk memenuhi tuntutan kompetensi lulusan sesuai dengan era revolusi industri 5.0, kurikulum pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dilengkapi dengan berbagai proses pembelajaran meliputi belajar mandiri, belajar dengan skema tutorial, yang kemudian merencanakan praktikum mata kuliah, struktur

kurikulum berbasis OBE dan program-program dalam skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Selanjutnya menjadi acuan dari pelaksanaan pembelajaran Program Studi Ilmu Pemerintahan FHSIP UT adalah Permendikbud No.109 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh, dikemukakan pada Pasal 2 bahwa Pendidikan Jarak Jauh mempunyai tujuan :

1. Memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka; dan
2. Memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran.

Program Studi Ilmu Pemerintahan FHSIP Universitas Terbuka dalam penyelenggaraan pembelajarannya tidak hanya mengikuti Permendikbud No.109 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh di PendidikanTinggi, tetapi juga mengikuti standar capaian pembelajaran dari KAPSIPI (Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia) yaitu berdasarkan Surat Keputusan KAPSIPI NOMOR: 055/KAPSIPI.KUR.S1/VIII/2020, Tentang Kurikulum Inti Nasional Ilmu Pemerintahan Jenjang Strata Satu Dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Secara jelasnya adalah sebagai berikut :

#### A. Tujuan Penetapan Rumusan Kurikulum Inti Nasional

1. Memberikan arah dan pedoman bagi pengelola Program Studi Ilmu Pemerintahan dalam penyelenggaraan pembelajaran pada Program Ilmu Pemerintahan;
2. Membantu pengelola Program Studi Ilmu Pemerintahan dalam menetapkan capaian pembelajaran dan bahan kajian pada setiap Mata Kuliah oleh Dosen pengampu;
3. Memberikan kejelasan mutu lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan agar mudah diterima pada lapangan pekerjaan; dan
4. Memberikan jaminan dan kepercayaan masyarakat yang berminat menempuh studi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan.

#### B. Profil Lulusan Sarjana Ilmu Pemerintahan

1. Memberikan arah dan pedoman bagi pengelola Program Studi Ilmu Pemerintahan dalam penyelenggaraan pembelajaran pada Program Ilmu Pemerintahan;
2. Mengaplikasikan ilmunya sebagai pegawai pada lembaga pemerintahan baik Pusat maupun Daerah;
3. Mengaplikasikan Ilmunya sebagai pegawai pada lembaga pemerintahan yang berafiliasi pada aktivitas luar negeri/internasional;
4. Mengaplikasikan ilmunya sebagai calon pimpinan pemerintahan di tingkat Desa; Daerah dan Lembaga Perwakilan;
5. Mengaplikasikan ilmunya sebagai pegawai pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Perusahaan Sektor Publik lainnya;
6. Mengaplikasikan ilmunya sebagai konsultan profesional bidang pemerintahan;
7. Mengaplikasikan ilmunya sebagai analis profesional bidang pemerintahan;
8. Mengaplikasikan ilmunya sebagai pendidik bidang pemerintahan;
9. Mengaplikasikan ilmunya sebagai peneliti bidang pemerintahan;
10. Mengaplikasikan ilmunya sebagai penggerak pada organisasi sosial/LSM yang profesional; dan
11. Mengaplikasikan ilmunya sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat.

### C. Parameter Capaian Pembelajaran Sikap Umum Sarjana Ilmu Pemerintahan

Setiap lulusan program pendidikan sarjana Ilmu Pemerintahan harus memiliki sikap sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

#### D. Parameter Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum Sarjana Ilmu Pemerintahan

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

#### E. Deskripsi Kualifikasi KKNI Level 6 Sarjana Ilmu Pemerintahan

1. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
3. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

#### F. Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus Sarjana Ilmu Pemerintahan

##### Deskripsi Generik:

Mampu mengaplikasikan bidang keahlian pemerintahan, mengkaji masalah-masalah pemerintahan dan memanfaatkan IPTEKS pada bidang pemerintahan dalam menyelesaikan masalah bidang pemerintahan serta mampu beradaptasi terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi.

Rincian capaian pembelajaran keterampilan khusus Sarjana Ilmu Pemerintahan sebagai berikut:

1. Mampu memimpin dan mengelola kelompok atau organisasi;
2. Mampu dan trampil melayani masyarakat melalui sistem dan prosedur baku;
3. Mampu melakukan pemetaan masalah dan potensi masyarakat kemudian menyusun perencanaan program berbasis kebutuhan/kepentingan masyarakat;
4. Mampu menganalisis masalah-masalah kebijakan dan menyusun pemetaan menjadi agenda kebijakan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah;
5. Mampu berbicara di depan publik dan meyakinkan publik dalam program/kegiatan pemerintahan;
6. Mampu berdiplomasi dalam sebuah proyek/program pemerintah yang memerlukan dukungan dari pihak lain;

7. Mampu dan trampil mengambil keputusan menyangkut penyelesaian masalah publik berdasarkan data dan informasi yang tepat dengan menggunakan metode ilmiah;
8. Mampu bekerjasama dan menjalin hubungan kerja (networking) dengan pihak terkait dengan program/kegiatan;
9. Mampu menggunakan Teknologi Informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan bidang pekerjaan sektor publik;
10. Mampu mengendalikan diri dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mencapai penyelesaian suatu program/kegiatan;
11. Mampu mengaplikasikan IPTEKS yang relevan dalam pengembangan bidang pemerintahan;
12. Mampu menuangkan gagasan/ide bagi pengembangan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai media yang sesuai;
13. Mampu melakukan analisis kondisi nasional, regional dan global menyangkut masalah-masalah pemerintahan;
14. Memiliki kepribadian yang berintegritas bagi pencapaian tujuan bangsa dan Negara Indonesia;
15. Memiliki kepekaan terhadap berbagai masalah sosial dan lingkungan hidup; dan
16. Memiliki sikap dan perilaku bertanggungjawab atas profesi yang akan dijalani.

#### G. Capaian Pembelajaran Penguasaan Pengetahuan Sarjana Ilmu Pemerintahan

##### Deskripsi Generik:

Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan pemerintahan secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.

Rincian capaian pembelajaran Penguasaan Pengetahuan Sarjana Ilmu Pemerintahan sebagai berikut:

1. Menguasai konsep dasar dan teori politik, negara, demokrasi dan pemerintahan;
2. Menguasai konsep dasar dan teori birokrasi pemerintahan dan sektor publik;
3. Menguasai konsep dasar dan teori pemerintahan dan sejarah perkembangan pemerintahan;
4. Menguasai konsep teoritis penyelenggaraan pemerintahan nasional;
5. Menguasai konsep teoritis penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;

6. Menguasai konsep dan model dalam manajemen pemerintahan dan organisasi sektor publik;
7. Menguasai konsep teoritis sistem kelembagaan politik, pemilu dan keparlemenan di Indonesia;
8. Menguasai konsep teoritis proses legislasi dan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah;
9. Menguasai konsep teoritis kepemimpinan pemerintahan dan organisasi sektor publik;
10. Menguasai konsep teoritis hubungan masyarakat dan pemerintahan melalui fungsi-fungsi pemerintahan;
11. Menguasai konsep teoritis pengambilan keputusan dalam mengatasi masalah-masalah publik;
12. Menguasai konsep teoritis dalam penelitian ilmiah dan pengembangan ilmu pemerintahan;
13. Menguasai konsep teoritis menyusun ide dan gagasan dalam sebuah karya tulis ilmiah bidang pemerintahan yang dipublikasikan;
14. Menguasai konsep teoritis hukum tata pemerintahan dan peranan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan;
15. Menguasai konsep teoritis komunikasi pemerintahan dan peranan media massa dalam pemerintahan;
16. Menguasai konsep teoritis partisipasi masyarakat, civil society, kelembagaan masyarakat dan pembangunan masyarakat;
17. Menguasai konsep teoritis pengawasan pemerintahan dan pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
18. Menguasai konsep teoritis pengelolaan keuangan negara/publik dan asset negara;
19. Menguasai konsep teoritis pengelolaan sumberdaya manusia pemerintahan;
20. Menguasai konsep teoritis tahapan dalam siklus kebijakan publik mulai dari perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan;
21. Menguasai konsep teoritis pelayanan kepada masyarakat pada sektor publik (public service);
22. Menguasai konsep teoritis masyarakat dan keragaman masyarakat dan budaya Indonesia;
23. Menguasai konsep teoritis pemberdayaan masyarakat;

24. Menguasai konsep teoritis teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
25. Menguasai konsep teoritis membangun jejaring sosial dalam pemerintahan;
26. Menguasai konsep teoritis perencanaan pembangunan dan kearifan lokal dalam pembangunan;
27. Menguasai konsep teoritis ekologi pemerintahan; dan
28. Menguasai konsep teoritis etika dan filsafat dalam pemerintahan.

Untuk menjalankan Permendikbud No.109 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh di Pendidikan Tinggi serta Standar Capaian pembelajaran dari KAPSIPI dengan Visi dan Misi PS Ilmu Pemerintahan sebagai berikut (Katalog Kurikulum FEB, FHSIP, FKIP, FST UT 2023/2024).

#### *Visi*

Menjadi Program Studi yang menghasilkan lulusan unggul di bidang tata kelola pemerintahan melalui penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ).

#### *Misi*

1. Menyelenggarakan pendidikan bidang Ilmu Pemerintahan melalui sistem PTTJJ.
2. Menyelenggarakan penelitian keilmuan dan terapan bidang ilmu Pemerintahan.
3. Menyelenggarakan program pengabdian masyarakat di bidang ilmu pemerintahan.
4. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan program studi Ilmu Pemerintahan.

#### *Tujuan*

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Menghasilkan produk keilmuan di bidang ilmu pemerintahan untuk menjawab tantangan pembangunan nasional.
3. Mendiseminasikan hasil-hasil riset bidang pemerintahan kepada masyarakat.

4. Menghasilkan program pengabdian masyarakat di bidang ilmu pemerintahan.
5. Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dalam menyelenggarakan Program Studi Ilmu Pemerintahan.

### **Capaian Pembelajaran**

Kurikulum Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan dirancang agar dapat ditempuh mahasiswa dalam waktu kurang lebih delapan semester. Kurikulum tersebut dibuat dalam bentuk paket arahan semester. Capaian Program Sarjana Ilmu Pemerintahan selain sikap dan tata nilai serta keterampilan umum yang telah disinggung pada pendahuluan, juga meliputi keterampilan khusus dan penguasaan pengetahuan sebagai berikut.

#### *Keterampilan Khusus*

1. Mampu memimpin dan mengelola kelompok atau organisasi.
2. Mampu melakukan pemetaan masalah dan potensi masyarakat serta menyusun perencanaan program berbasis kebutuhan/kepentingan masyarakat.
3. Mampu menganalisis masalah pemerintahan dan memberikan solusi berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah.
4. Terampil melayani masyarakat berdasarkan sistem dan prosedur.
5. Mampu berdiplomasi dengan pemerintah dan lembaga non pemerintah untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat.
6. Mampu membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah publik berdasarkan data yang sah.
7. Mampu bekerjasama dan menjalin hubungan kerja dengan pihak yang terkait dengan program/kegiatan.
8. Mampu memahami tata kelola pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi.
9. Mampu menganalisis fenomena pemerintahan.
10. Memiliki sikap dan perilaku bertanggungjawab atas profesi yang akan dijalani.
11. Mampu memahami karakteristik masyarakat setempat.

#### *Penguasaan Pengetahuan*

1. Menguasai kajian pemerintahan ditinjau dari aspek keilmuan, yuridis, dan empiris.
2. Menguasai konsep dasar dan teori birokrasi pemerintahan dan sektor publik.
3. Menguasai konsep dasar dan teori pemerintahan serta sejarah perkembangan pemerintahan.

Untuk mencapai tujuan seperti yang dikemukakan di atas, disusunlah kurikulum yang selaras dengan tujuan dari penyelenggaraan PS Ilmu Pemerintahan FHSIP Universitas Terbuka. Khususnya tujuan *“Menghasilkan sarjana ilmu pemerintahan yang mampu menggunakan konsep dan teori bidang pemerintahan dan dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan domain pemerintahan, serta memecahkan masalah yang terjadi didalamnya”* dengan capaian pembelajaran *” berpikir kritis yang berhubungan dengan disiplin ilmu pemerintahan “* yang diturunkan dalam struktur kurikulum terdapat mata kuliah-mata kuliah dalam implementasinya memerlukan praktikum, sebagai mana mandat dari Permendikbud No.109 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh di Pendidikan Tinggi Pasal 8 ayat (1) pada poin d bahwa penyelenggaraan pendidikan jarak jauh (PJJ) diwajibkan mempunyai sumber daya praktik dan/atau praktikum atau akses bagi peserta didik untuk melaksanakan praktik dan/atau praktikum.

Tujuan Program Studi Ilmu Pemerintahan FHSIP Universitas Terbuka sudah selaras dengan Permendikbud No.109 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh di Pendidikan Tinggi Pasal 8 ayat 1 pada poin d bahwa penyelenggaraan pendidikan jarak jauh (PJJ) diwajibkan mempunyai sumber daya praktik dan/atau praktikum atau akses bagi peserta didik untuk melaksanakan praktik dan/atau praktikum yang sesuai dengan pendapatnya Zeichner (1996) menyarankan bahwa praktikum harus menjadi waktu untuk pertumbuhan dan pembelajaran.

Di dalam Pelaksanaan tujuan capaian pembelajaran tersebut, Program Studi Ilmu Pemerintahan FHSIP Universitas Terbuka dalam pelaksanaannya berkordinasi dengan UT Daerah yang tersebar di seluruh Wilayah Indonesia, UT Daerah adalah unit pelaksana teknis UT di daerah. Adapun fungsi dan tugas UT Daerah adalah sebagai tempat mahasiswa untuk melakukan kegiatan administratif akademik dan kegiatan akademik. Untuk kegiatan sehari-hari, UT Daerah mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan belajar jarak jauh.

Berdasarkan tujuan tersebut Program Studi Ilmu Pemerintahan FHSIP Universitas Terbuka belum ada secara tertulis untuk menyelenggarakan praktikum dalam kurikulumnya, dengan salah satu bukti bahwa saat ini belum terselenggaranya praktikum dari mata kuliah atau adanya mata kuliah praktikum yang tertulis dalam kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan FHSIP Universitas Terbuka.

*Dimensi tujuan*, mendefinisikan hasil yang diinginkan dari pengalaman bagi semua kelompok pemangku kepentingan. Tujuan dan harapan untuk semua *stakeholders* harus diartikulasikan dalam tujuan pengalaman yang berhubungan dengan pekerjaan.

Hasil dari dilakukannya pengambilan data menghasilkan bahwa memang perlu diadakannya mata kuliah praktikum guna mendukung soft skill dan hard skill mahasiswa PS Ilmu Pemerintahan, dimana memang kuliah di UT dilakukan secara online.

Berdasarkan hasil wawancara, mahasiswa membutuhkan praktik yang tujuannya menjadikan lulusan program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka ini memiliki kemampuan IT. Seperti yang disampaikan berikut:

*Mata kuliah yang mestinya ada praktiknya adalah Sistem Informasi Manajemen, dimana mata kuliah system informasi manajemen tidak hanya dianggap sebagai ilmu murni atau sebagai suatu seni tetapi lebih dianggap sebagai suatu kombinasi antara ilmu murni dan seni. Sistem Informasi Manajemen lebih menekankan pada bagaimana sesuatu diselesaikan. Mata kuliah ini menurut saya butuh ada praktiknya karena ada berbagai aktivitas atau fungsi yang dilakukan oleh system Informasi Manajemen yang mahasiswa butuh ada praktiknya seperti Data Capturing, Processing of Data, storage of informasion, Retrieval of informasion dan juga dissemination of Informasion. Jika tidak ada praktiknya mahasiswa hanya mendapatkan teori saja tanpa bisa praktik langsung. (Isnani, 10 November 2023).*

Pandangan Mahasiswa dalam dimensi tujuan terkait dengan pertanyaan mata kuliah yang sangat diperlukan ada praktiknya di PS Ilmu Pemerintahan, memberikan respon dianggap penting adalah mata kuliah *Manajemen Pelayanan Umum dan Manajemen Pemerintahan*. Ketika diajukan memilih mata kuliah tersebut, mahasiswa mengemukakan:

*Menurut saya keterampilan yang semestinya diperoleh seorang mahasiswa ilmu pemerintahan adalah bagaimana caranya melakukan pelayanan yang baik yang dapat memuaskan pelanggan atau pemohon layanan yang sesuai dengan standar layanan dan juga standar operasional prosedur, amat disayangkan bilamana seorang mahasiswa yang lulusan ilmu pemerintahan hanya bisa dapat menguasai teori namun tak mampu mempraktikkannya di lapangan, karena pengalaman saya bekerja di instansi pelayanan publik selama 13 tahun sangat berbeda tentang teori yang kita kuasai dengan praktik di lapangan yang notabane nya ada gesekan langsung atau berhadapan lansung dengan pemohon layanan.*

*Menurut saya keterampilan yang semestinya diperoleh adalah : keterampilan mengolah data Sistem Informasi Manajemen dengan menggunakan teknologi computer (CBMISs). Karena saat ini Sistem Informasi Manajemen identic dengan system informasi manajemen berbasis computer. Karena mengolah data dengan*

*computer mampu mengolah dengan cepat dan teruji tidak terbatas tenaga sehingga optimal dan akurat*

Ketika diberikan pertanyaan mengenai kegiatan praktikum apa saja yang penting mendapat perhatian dalam praktikum mata kuliah PS Ilmu Pemerintahan agar bermanfaat, informan Mahasiswa mengemukakan:

*Menurut saya yang penting mendapat perhatian setelah melihat struktur mata kuliah yang saat ini adalah dapat menguasai praktik layanan dasar sebagai penyelenggara pelayanan, karena jika seorang mahasiswa ilmu pemerintahan bekerja di lembaga pemerintah maka hal realisasi praktik pelayanan sangat dituntut untuk dikuasai.*

Sesuai dengan pendapatnya Informan dari pegawai di UT Daerah Bandung mengatakan bahwa :

*“kalau kami di UT Daerah akan siap saja melaksanakan praktikum mata kuliah, seperti halnya Program Studi Hukum, sudah jelas dalam kurikulumnya ada, serta model dan aturan kerjanya sudah ada, yaitu mereka harus datang ke pengadilan, dan berkelompok, kalau untuk program studi ilmu pemerintahan itu belum ada, jadi kami belum bisa menyelenggarakan, karena dikurikulum program studi ilmu pemerintahan tidak ada simbol untuk ada praktikumnya, jadi kalau kami gimana pusat memberikan kebijakannya, karena UT Daerah adalah unit pelaksana teknis universitas Terbuka di daerah”*

Selain dari UT Daerah di perkuat juga dari salah satu informan dari pengurus pokjar yang mengatakan :

*“Kalau kami untuk pembelajaran yang praktikum siap saja bantu mahasiswa, asal sudah jelas kebijakannya dari UT, tetapi untuk sampai saat ini mata kuliah dari program ilmu pemerintahan itu belum ada mata kuliah praktikum, atau praktikum mata kuliah”*

Poin yang menjadi tujuan penelitian disambut baik mahasiswa dan alumni, jika PS Ilmu Pemerintahan dalam struktur kurikulumnya terdapat mata kuliah yang berpraktikum, seperti halnya di kemukakan oleh salah satu informan mahasiswa menyatakan bahwa :

*“Saya menginginkan belajar itu tidak hanya teori saja tetapi harus ada praktik yang bisa saya lakukan, supaya bisa mengaplikasikan pengetahuan yang saya terima, walaupun saya bekerja tetapi secara teori dan praktiknya itu sangat di butuhkan oleh saya”.*

Pada dimensi tujuan terkait pendapat Pakar/Praktisi, ketika ditanyakan jenis keterampilan yang diperlukan dan penting mendapat perhatian dalam praktikum mata kuliah PS Ilmu Pemerintahan agar bermanfaat bagi mahasiswa dan selanjutnya dapat diterapkan di lapangan mereka mengemukakan :

*Profil lulusan di kurikulum OBE sudah di tentukan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FHSIP yaitu Community Leader Bidang Pemerintahan, Analis Pemerintahan, Konsultan Pemerintahan, Pegiat Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Yang perlu diperhatikan adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia-atau yang lebih di kenal SKKNI yang sesuai dengan profesi profil lulusan, sesuai arahan dari aturan tentang Pendidikan Tinggi yakni Perpres Nomor 08 Tahun 2012 Tentang KKKNI. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013. Misalnya seorang analis pemerintahan, analis yang dimaksud harus jelas apakah analis kebijakan atau analis kelembagaan, atau analis apa? Masing-masing memiliki SKKNI baik yang diatur dalam Permenpan tentang kompetensi okupasi atau Permenaker terkait kompetensi profesi, pada SKKNI tersebut sangat jelas aspek pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan apa yang perlu diberikan untuk mencapai suatu kompetensi tertentu (Novie Indrawati, 15/06/23).*

Pakar lainnya berpendapat :

*Dari ke-4 profil lulusan seperti Community Leader Bidang Pemerintahan, Analis Pemerintahan, Konsultan Pemerintahan, Pegiat Organisasi Sosial Kemasyarakatan, maka mata kuliah yang perlu adanya praktikum yang paling utama adalah Metode Penelitian, dengan praktik mahasiswa diwajibkan untuk penelitian ke lapangan guna melatih kemampuan dalam mengidentifikasi, menentukan dan merumuskan masalah. mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menyajikan informasi secara objektif dan akurat. Mata kuliah yang berkaitan dengan organisasi, jenis praktik yang ditugaskan berupa suatu proyek melakukan kegiatan dengan dibentuknya suatu tim kerja guna melatih kerjasama, dan melatih pengambilan keputusan. Mata kuliah yang berkaitan dengan komunikasi pemerintahan misalnya, mahasiswa perlu adanya praktik negosiasi, guna melatih mahasiswa secara verbal maupun sikap/kepribadian, bentuk bisa berupa proyek. Mata kuliah yang berkaitan dengan kebijakan, mahasiswa perlu adanya praktik bagaimana mahasiswa bisa membuat sebuah Policy brief dan policy paper. (Mas Halimah, 15/06/23).*

Hasil analisis Tim Peneliti (konklusi data penelitian, 2023) berpandangan praktikum mata kuliah adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah suatu mata kuliah atau bagian mata kuliah tertentu. Jenis keterampilan yang dibutuhkan

oleh para mahasiswa tentunya mereka diberikan kemampuan agar mampu mengaplikasikan dan menerapkan bidang-bidang tata kelola ilmu pemerintahan. Mahasiswa dengan bekal dari kegiatan lapangan mampu berinovasi dan berkreasi untuk membangun dan mengembangkan kapasitas bidang pemerintahan yang bermanfaat paling tidak dalam wilayah domisinya. Semua jenis keterampilan sangat dibutuhkan di era digitalisasi dan globalisasi, karena konsep pemerintahan yang ideal seperti yang dikemukakan dalam KKN penjenjangan level 6 untuk program sarjana, harus mampu menjawab tantangan yang dinamis akan kebutuhan dan keinginan masyarakat/pasar sulit atau rumit diprediksi atau terus berubah-berubah, maka dari itu pendidikan menyediakan lulusan yang kreatif dan inovatif, baik sebagai tenaga kerja di pemerintahan dan swasta, wirausaha, Lembaga swadaya masyarakat dan lainnya. Salah satu cara menempa mahasiswa untuk berkemampuan seperti digambarkan di atas, melalui praktikum mata kuliah yang terstandar di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan, sebagian besar mahasiswa sangat tertarik jika ada mata kuliah praktikum di PS IPEM, selain memang mereka membutuhkan soft skill tersebut, mereka juga merasa bahwa perlu kenal satu sama lain dengan mahasiswa lainnya dan menurut mereka itu akan menambah semangat kuliah dan menjadi lebih merasa sebagai mahasiswa seperti mahasiswa dikampus lain pada umumnya. Mereka akan sangat senang jika memang nanti kedepannya akan ada beberapa mata kuliah praktikum yang akan dibuka di PS IPEM. Mata kuliah yang menurut mereka dirasa perlu yaitu Manajemen Pelayanan Umum dan Manajemen Pemerintahan, karena menurut mereka ini adalah core dari Ilmu Pemerintahan.

Jika menurut alumni, seharusnya memang dari dahulu PS IPEM membuka kelas praktikum seperti prodi-prodi lain, karena memang sesungguhnya mahasiswa membutuhkan itu. Menurut alumni, bisa dilakukan dengan skema bekerjasama dengan instansi pemerintahan, sehingga manfaat yang bisa didapat juga bernilai lebih. Selain menambah soft skill mahasiswa, juga menambah pengalaman serta pengetahuan terkait instansi tersebut. Rata-rata dari alumni menyatakan bahwa mata kuliah yang sebaiknya dipraktikan adalah mata kuliah wajib saja, karena mengingat keterbatasan akses, jarak, maupun waktu yang berbeda dari masing-masing mahasiswa. Tetapi yang jelas para alumni sangat senang jika dikemudian hari junior-juniornya mendapatkan Pendidikan yang lebih baik lagi dari PS IPEM.

Untuk Pokjar, apapun yang akan dilakukan oleh prodi, mereka siap membantu. Apalagi Bagansiapiapi merupakan salah satu Pokjar yang jumlah mahasiswanya terhitung banyak di wilayah Pekanbaru. Sehingga memang sudah merupakan tugas Pokjar untuk dapat menjalankan semua instruksi dan arahan baik dari UT Pekanbaru dan ataupun UT Pusat

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan Tim Peneliti terkait langkah yang dapat dilakukan berdasarkan pengalaman Pakar dalam mengelola Program Studi Terapan Administrasi Pemerintahan, terutama menyangkut mengelola mata kuliah berpraktikum, Pakar mengemukakan sebagai berikut :

*Melaksanakan diskusi terfokus dengan lembaga-lembaga sesuai sasaran pekerjaan profil lulusan, seperti instansi pemerintah, misalnya menjadi seorang analis kebijakan maka melakukan diskusi tentang tugas-tugas pekerjaan mereka, apa yang sekiranya bisa dipraktikkan melalui praktik mata kuliah atau magang (Novie Indrawati, 15/06/23).*

Pakar lain mengemukakan sebagai berikut : :

*Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya dalam kegiatan kuliah umum yang wajib diikuti oleh mahasiswa PS Ilmu Pemerintahan dan setiap angkatan diberi kesempatan untuk mengadakan kegiatan kunjungan ke instansi yang disesuaikan dengan kebutuhan program studi dan mata kuliah (Neneng Widya Amellia, 15/06/23).*

Hasil analisis Tim Peneliti (konklusi data penelitian, 2023), agar dimensi tujuan penyusunan mata kuliah praktik dapat masuk dalam struktur kurikulum setelah mengumpulkan pendapat dari Pakar Bidang Pemerintahan adalah : (a) perencanaan praktikum salah satunya membuat model praktikum dari setiap mata kuliah yang akan di praktikkan; (b) menjalin kerjasama/mitra untuk melaksanakan model praktikum; (c) adanya penyamaan persepsi dengan mitra, mahasiswa dan stakeholder lainnya; (d) pelaksanaan praktikum (pre test, dan pos test materi praktikum harus ada); dan (e) evaluasi model praktikum dari setiap mata kuliah. Langkah-langkah penyusunannya mata kuliah berbasis praktikum dapat dilakukan sebagai berikut :

- analisis kebutuhan lulusan Sarjana Ilmu Pemerintahan
- penyusunan mata kuliah berbasis praktikum melibatkan dosen dan pengguna lulusan

- sesuaikan dengan visi dan misi Universitas Terbuka
- sesuaikan dengan visi dan misi FHSIP
- sesuaikan dengan visi dan misi Program Studi
- penyusunan tujuan program praktikum /Program Objectives (PO)
- penyusunan matakuliah praktikum berbasis PLO (Program Learning Outcomes) yang mengacu pada KKN level 6
- penyusunan matakuliah praktikum berbasis tujuan mata kuliah/Course Learning Objectives (CLO).

Seagall (2002) mengemukakan bahwa praktikum adalah aspek yang paling berharga dari program pendidikan, jadi Program Studi Ilmu Pemerintahan FHSIP Universitas Terbuka dengan tujuan yang sudah jelas “*“Menghasilkan sarjana ilmu pemerintahan yang mampu menggunakan konsep dan teori bidang pemerintahan dan dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan domain pemerintahan, serta memecahkan masalah yang terjadi didalamnya”*” dengan capaian pembelajaran “*berpikir kritis yang berhubungan dengan bidang pemerintahan*” untuk mencapai tujuan dan capaian pembelajaran tersebut dapat tercapai dengan di selenggarakannya praktikum mata kuliah dalam pelaksanaan pembelajarannya, karena semua elemen penyelenggara pendidikan diantaranya Program Studi, Universitas Terbuka, UT Daerah, Alumni dan Pengguna lulusan mempunyai tujuan yang sama, di perkuat dari mahasiswa yang menginginkan adanya praktik dari teori yang mereka terima, sebagai sarana pengembangan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa. Penempatan praktikum sangat penting untuk mempromosikan kohesi antara teori dan praktik dalam pendidikan (Falkenberg & Smits, 2010; Le Cornu & Ewing, 2008).

### **5.2.2 Deskripsi Telaah *Dimensi Konteks***

Pada dimensi konteks menjelaskan mengenai karakteristik dari mahasiswa dan pengajar/tutor yang ditugaskan dalam melakukan mentoring dan pembinaan yang berada di Daerah. Tanggapan Mahasiswa perlunya pendamping/pembimbing/tutor dalam pelaksanaan praktikum mata kuliah PS Ilmu Pemerintahan, mereka mengemukakan :

*Sangat perlu, kami dapat berkomunikasi dengan pembimbing tentang gejala-gejala atau hambatan-hambatan yang di jumpai di lapangan, agar teori yang di dapat hendaknya sesuai dengan realisasi praktiknya dilapangan*

Menurut Mahasiswa dalam pelaksanaan praktikum mata kuliah PS Ilmu Pemerintahan perlu adanya pendamping lain terutama dari instansi tempet berpraktik, selain tutor dalam pelaksanaan praktikum, Mahasiswa mengemukakan :

*Perlu, seperti halnya pembimbing pada instansi tempat kami praktik, hal ini dapat menjembatani persoalan persoalan yang ada di unit praktik dengan mata pelajaran yang sedang dipelajari oleh kami, seperti halnya tentang manajemen konflik, bagaimana seharusnya dapat mengelola konflik-konflik yang selalu bermunculan di instansi penyelenggara pemerintahan di bidang pelayanan publik.*

Mengenai dimana seharusnya dilakukan tempat pelaksanaan praktikum mata kuliah PS Ilmu Pemerintahan, Mahasiswa mengemukakan :

*Dititipkan di inntansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik, pelayanan dasar pemerintahan, menurut hemat saya setelah menempuh semua mata kuliah di prodi ilmu pemerintahan hampir 80% teori yang saya pelajari justru sudah di praktikkan di instansi saya bekerja yakni di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, saya tidak tahu untuk teman mahasiswa lainnya yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan.*

Ya menurut saya dalam pelaksanaan praktikum mata kuliah PS Ilmu Pemerintahan perlu adanya pendamping lain selain tutor dalam pelaksanaan praktikum. Yaitu Pegawai dari instansi yang mahasiswa tempati untuk melakukan praktikum. Pendampingan perlu dilakukan selain tutor adalah pegawai di instansi tempat mahasiswa magang karena merekalah yang tahu system manajemen yang ia terapkan di organisasi tersebut.

Menurut saya selain pendamping dalam pelaksanaan praktikum mata kuliah PS Ilmu Pemerintahan diperlukan petugas yang lain. Yaitu atasan dari instansi tersebut, tugasnya menilai mahasiswa tersebut dalam pelaksanaan praktikum di instansi tersebut. Sehingga dapat dinilai berhasil tidaknya mahasiswa tersebut dalam praktikum.

Menurut saya tempat pelaksanaan praktikum mata kuliah Program Studi Ilmu Pemerintahan yang cocok, dilakukan di lapangan langsung yakni instansi pemerintahan sehingga mahasiswa langsung bisa belajar terjun langsung di dunia kerja dan akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang nanti akan mereka implementasikan. Pengecualian untuk mahasiswa yang sudah bekerja full dan tidak memungkinkan diberi kelonggaran melalui praktikum online.

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FHSIP Universitas Terbuka dapat dilihat dari dua karakter diantaranya yaitu dilihat dari faktor lokasi dan faktor status pekerjaan. Faktor lokasi yang dimaksud yaitu lokasi atau tempat dimana mahasiswa untuk melakukan proses pembelajaran terutama Tutorial Tatap Muka (TTM), tempat TTM ini untuk jarak tempuh dan waktu tempuh dari tempat tinggal mahasiswa sangatlah bervariasi. Dalam artian waktu tempuh ke lokasi tidak memakan waktu lama kurang lebih bagi yang tinggal di pokjar Yogyakarta memakan waktu kurang lebih 20 menit sampai dengan 30 menit dengan jarak tempuh paling jauh kurang lebih 15 km, sesuai dengan pernyataan dari informan mahasiswa dari pokjar Yogyakarta, mengatakan bahwa:

*Kalau saya untuk sampai ke sini kurang lebih 15 menit karena dekat rumah, untuk temen-temen yang sekelas saya itu mayoritas tinggalnya dekat disini juga kurang lebih yang jauh itu ada 5 orang dengan waktu kurang lebih 30 menit, yah cuman 15 km paling jauh....*

Untuk karakteristik mahasiswa di Kota Bandung tidak jauh berbeda dengan karakteristik di Kota Yogyakarta, lokasi mahasiswa dengan tempat lokasi TTM tidak begitu jauh dan menggunakan perjalanan darat, kurang lebih dengan waktu tempuh 1 jam (Kabupaten Bandung) serta lokasi berada pada daerah perkotaan. Sesuai dengan pernyataan dari salah satu informan mahasiswa mengatakan bahwa :

*Kalau saya dari rumah kesini kurang lebih 1 jam, rumah saya dekat, eem sebagian besar teman-teman sayapun dekat dari sini.*

Tidak jauh berbeda dengan pendapatnya informan dari Penanggungjawab Praktikum UT Bandung, bahwa lokasi tempat tinggal mahasiswa ke tempat TTM tidak terlalu jauh kurang lebih jarak tempuh 30 KM dengan waktu tempuh kurang lebih 1-2 jam, informan UT Bandung mengatakan bahwa :

*Jarak tempat tinggal mahasiswa ke sini itu tidak terlalu jauh, kurang lebih waktu tempuh ke sini adalah 1 sampai dengan 2 jam, karena jarak tempuh kurang lebih hanya 30 km yang lamanya itu karena jalannya macet, jadi waktu tempuhnya terkendala.*

Untuk kedua lokasi UT Daerah di atas yaitu UT Bandung dan UT Yogyakarta pada dasarnya faktor lokasi tidak begitu bermasalah. Di sisi lain secara nasional, mahasiswa

Universitas Terbuka tersebar sampai pelosok-pelosok terjauh, sehingga Tim Peneliti untuk pembandingan lokasi mencari tempat lain guna melihat karakteristik mahasiswa yang berada di pelosok untuk dijadikan sumber informasi mentoring dan pembinaan terkait kegiatan pelaksanaan praktik mata kuliah yaitu Pokjar Sintang, di pokjar ini, menurut Pengurus Pokjar Sintang, untuk waktu tempuh bermasalah sehingga diperlukan mahasiswa itu menginap di lokasi TTM, dikarenakan transportasi darat, Sungai, penyebrangan dan faktor cuaca, jadi di daerah Sintang ini mahasiswa untuk datang mengikuti TTM itu perlu persiapan waktu yang cukup untuk datang ke lokasi TTM dengan kapal motor, baik besar maupun kecil, seperti halnya yang di kemukakan oleh informan Pokjar mengatakan bahwa :

*Mahasiswa untuk datang ke sini ada yang harus menginap, kan TTM sampai jam 5, sedangkan kapal motor besar ataupun kecil, juga perahu Ketingting hanya sampai jam 4, kan disini tranfortasinya sungai, tergantung cuaca juga, kalau masih siang tapi cuaca buruk tak bisa jalan, yah mahasiswa harus menginap disini, itu kalau pulangnyanya, belum pas datang ke sini kan TTM sabtu jadi mereka hari jumat dah datang kesini jadi menginap malam sabtunya, jadi kalau TTM Sabtu Minggu jadi mereka disini sampe 4 hari dari hari Jum'at sampai Senin.*

Karakteristik berikutnya yaitu status pekerjaan dari mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FHISIP Universitas Terbuka yang berada pada dua lokasi di UT Bandung dan UT Pontianak (Sintang), serta mahasiswa Tuton sebagian besar berstatus pekerja, kebanyakan di swasta/non PNS.

^ Berdasarkan kedua karakter tersebut yaitu faktor lokasi dan status pekerjaan dalam rangka melaksanakan praktikum mata kuliah PS Ilmu Pemerintahan dirancang untuk dapat dilakukan secara individual dan kelompok di tempat kerjanya masing-masing dalam bidang kegiatan pemerintahan.

Sumber daya Tutor yang ada di Setiap Pokjar berasal dari beberapa perguruan tinggi yang ada di lingkungan sekitar, juga pegawai Instansi Daerah, baik dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta, serta Instansi Pemerintah atau Yayasan Swasta Berbadan Hukum yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam setiap mata kuliah pemerintahan. Untuk pelaksanaan TTM di wilayah perkotaan dan mendapatkan

Tutor/pendamping itu melalui seleksi yang sudah ditentukan sesuai kebijakan Universitas Terbuka, seperti halnya di wilayah UT Bandung dan UT Yogyakarta.

Berbeda dengan pokjar yang ada di daerah seperti halnya pokjar Sintang yang lokasinya jauh dari ibukota provinsi, melalui Sungai Kapuas, kondisi Sintang tidak sepenuhnya mendapatkan tutor dari daerah asalnya sendiri sehingga untuk mendapatkan tutor agak sulit, karena untuk mendatangkan tutor dari Kota Pontianak terlalu jauh. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu informan pokjar mengatakan bahwa :

*Kalau untuk mendapatkan tutor disini kesulitan, karena jarak yang membuat kendala bagi kami, jadi kami harus mendatangkan tutor dari Pontianak, karena ada beberapa tutor yang di perlukan tidak tersedia di sini.*

Berdasarkan karakteristik yang ada di mahasiswa dan tutor/pendamping untuk pelaksanaan praktikum mata kuliah PS Ilmu Pemerintahan, dapat dilakukan di tempat kerja atau lokasi dimana mereka tinggal dengan arahan dari tutor/pembimbing PS Ilmu Pemerintahan yang kompetensinya memiliki kesesuaian kualifikasi.

### **5.2.3 Deskripsi Telaah *Dimensi Integrasi***

*Dimensi integrasi* merupakan hubungan antara teori dan praktik. Integrasi adalah proses melalui dialog, refleksi kritis, tutorial dan bekerja diakses baik di tempat kerja dan lembaga pembelajaran.

Dalam pelaksanaan praktikum mata kuliah PS Ilmu Pemerintahan yang perlu di praktikkan, informan mahasiswa mengemukakan :

*Sebagian modul saja, seperti misalnya modul modul tentang praktik yang dilakukan di lembaga pemerintahan.*

Menurut Anda apakah dalam pelaksanaan praktikum mata kuliah PS Ilmu Pemerintahan melalui online, offline, hybrid atau skema lainnya seperti MBKM?

*Bisa seperti MBKM melalui magang atau praktik kerja lapangan, dengan hal tersebut mahasiswa dapat merasakan bagaimana mempraktikan teori teori yang telah dipelajari. Sebaiknya praktik langsung dikerjakan di lapangan atau offline, bersentuhan lansung dengan penyelenggara dan pengguna pemerintahan itu sendiri terlebih pada instansi penyelenggara pelayanan.*

Dimensi integrasi ini tidak lain berkaitan dengan pelaksanaan tutorial, proses komunikasi serta kemudahan dalam akses pelaksanaan praktikum. Untuk proses tutorial praktikum PS Ilmu Pemerintahan itu terintegrasi dengan Mata kuliah PS Ilmu Pemerintahan, sehingga dalam mengarahkan dan membimbing mahasiswa dengan bantuan tutor/pembimbing mata kuliah PS Ilmu Pemerintahan maka praktik akan terlaksana dengan baik, seperti yang disampaikan oleh informan mahasiswa mengatakan bahwa :

*“Menurut saya perlu adanya pembimbing untuk pelaksanaan praktikum manajemen pemerintahan, karena kami perlu arahan dalam pelaksanaan praktiknya, apabila kami mengalami kesulitan dan saya kurang mengerti maka kami bisa bertanya sama pembimbing dan didiskusikan pada pembimbing secara langsung.”*

Selain adanya pembimbing untuk memperlancar komunikasi dalam pelaksanaan praktikum, juga mahasiswa di bantu dengan bantuan buku panduan praktikum, mengingat didalam mata kuliah PS Ilmu Pemerintahan hanya berbentuk Buku Materi Pokok/Modul saja, dalam modul tersebut belum ada materi yang cara melakukan praktikum, seperti yang disampaikan oleh mahasiswa mengatakan bahwa :

*“Isi modul ilmu pemerintahan masih membahas mengenai konsep dan teori saja, tidak ada bahan yang menjelaskan untuk praktik, sebaiknya matakuliah ada praktikumnya terutama yang berkaitan dengan operasi ketatausahaan, itu sangat penting buat kami, contohnya tata cara membuat surat dinas atau surat resmi yang baik, sehingga materi itu bisa kami dapatkan untuk memperlancar pekerjaan kami di tempat kerja”*

Dengan tersedianya Buku Materi Pokok (BMP) tetapi di dalam isi modul tersebut belum membahas praktik dari materi yang telah tersedia, itu diperlukan adanya aturan-aturan serta tata cara pelaksanaan praktikum, sebagaimana yang dijelaskan oleh inorman UT Daerah mengatakan bahwa pelaksanaan praktikum di Universitas Terbuka benar-benar harus jelas tertuang secara tertulis dalam buku pedoman, karena mahasiswa Universitas terbuka mempunyai prinsip belajar mandiri, pernyataan informan tersebut sebagai berikut:

*“Untuk menyelenggarakan praktikum di universitas terbuka yang sudah berjalan salah satunya Program studi Hukum dan Program Studi Kearsipan yang sudah mempunyai pedoman tersendiri untuk melakukan praktikum, contoh dalam pedoman*

*tersebut ada aturan bahwa mahasiswa harus berkelompok minimal 5 orang untuk praktikum Mata kuliah yang ada di Prodi Hukum, nah mahasiswa harus mencari dulu teman sekelomponya, kalau belum dapat kelompok yah belum di mulai praktiknya, jadi kalau sudah ada buku pedoman itu sangat memudahkan UT Daerah dalam pelaksanaan praktikum, karena UT Daerah akan berpatokan pada buku pedoman tersebut dalam pelaksanaan praktikumnya, jadi kami disini tinggal menyampaikan buku pedoman itu kepada mahasiswa. dan untuk pelaksanaanya ada pembimbing lapangan, pembimbing lapangannya adalah pejabat atau pegawai dimana mahasiswa tersebut ditempatkan, itu salah satu contoh yang sudah dilakukan. “*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan UT Daerah mengatakan bahwa untuk menjalankan praktikum mata kuliah dengan akses dititipkan di Instansi Pemerintah atau Perusahaan itu sangat mendukung sekali karena kerjasama yang dilakukan pihak UT Daerah sangat erat dan baik dengan setiap lembaga pemerintah maupun perusahaan, seperti yang di katakan informan berikut ini :

*“Kalau untuk pelaksanaan praktikum mata kuliah dengan dititipkan di isntansi pemerintah itu tidak jadi masalah, karena kami sangat menjalin hubungan baik dengan Instansi Pemerintah maupun perusahaan yang ada di lingkungan kami, bahkan secara individualpun kami sangat baik karena pegawai yang ada pemerintahan atau perusahaan itu ternyata alumni kami...”*

Menurut saya dalam pelaksanaan praktikum mata kuliah PS Ilmu Pemerintahan ini yang perlu di praktikkan tidak perlu semua materi modul, namun saya rasa sebagian modul yang penting-penting saja yang perlu di praktikkan sehingga lebih efektif dan efisien. Menurut saya dalam pelaksanaan praktikum mata kuliah PS Ilmu Pemerintahan bisa melalui online, offline, hybrid atau skema lainnya disesuaikan dengan yang akan dipraktikkan dan kondisi mahasiswa.

Menurut saya dalam pelaksanaan praktikum mata kuliah PS Ilmu Pemerintahan bisa dilakukan secara virtual (Online) bagi yang full sudah bekerja dan tidak bisa ditinggalkan, namun praktek luring penting dilakukan bagi mahasiswa yang belum bekerja sehingga mahasiswa akan benar-benar bisa praktik nyata.

Menurut saya dalam pelaksanaan praktikum mata kuliah PS Ilmu Pemerintahan dilakukan melalui media pembelajaran digital karena saat ini yang cocok dan tidak bisa dipungkiri dengan media digital lebih efisien dan cepat.

Dari informasi tersebut menunjukkan untuk dimensi integrasi, bahwa menjalin komunikasi dengan Tutor /Pembimbing dengan bantuan belajar buku panduan praktikum dan untuk kemudahan akses mahasiswa dalam melaksanakan praktikum mata kuliah adalah dengan cara dititipkan pada lembaga pemerintah atau swasta yang mereka saat ini tempati sebagai tempat kerja mahasiswa tersebut. Penempatan praktikum sangat penting untuk mempromosikan kohesi antara teori dan praktek dalam pendidikan (Falkenberg & Smits, 2010; Le Cornu & Ewing, 2008). Penempatan praktikum, baik pengaturan tradisional dan non-tradisional, menumbuhkan kesempatan untuk siswa untuk bekerja untuk belajar serta belajar bekerja (Cooper et al., 2010).

#### **5.2.4 Deskripsi Telaah Dimensi Kurikulum**

Menurut Mahasiswa, dengan cara PPL (Program Pengalaman Lapangan) pelaksanaan praktikum mata kuliah PS Ilmu Pemerintahan dapat memberikan pengalaman praktik kepada mahasiswa dan sangat bermanfaat, Ini pengakuan secara teori dan praktik kerja yang diintegrasikan ke dalam pengalaman. Jadi praktikum mata kuliah tersebut cara belajar di tempat kerja dan kebutuhan untuk menanamkan pembelajaran di institusinya. Itulah muatan kurikulum yang sebenarnya.

Dimensi kurikulum ini tidak lain adalah kurikulum yang ada di Program Studi Ilmu Pemerintahan FHISIP UT yang di dalamnya memuat semua mata kuliah sesuai dengan Tujuan dan Capaian Pembelajaran Program Studi Ilmu Pemerintahan FHISIP UT. Tujuan dari Program Studi Ilmu Pemerintahan FHISIP UT salah satunya adalah *“Menghasilkan sarjana Ilmu Pemerintahan yang mampu menggunakan konsep dan teori administrasi negara dan dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan domain publik, serta memecahkan masalah yang terjadi didalamnya”* Capaian Pembelajaran yang dijadikan patokan Program Ilmu Pemerintahan FHISIP UT yang salah satunya yaitu *“berpikir kritis yang berhubungan dengan disiplin ilmu administrasi publik”* untuk merealisasikan tujuan dan capaian dari Program Studi Ilmu Pemerintahan FHISIP UT, itu di butuhkan pengalaman dari setiap mahasiswa yang ada di program studi Ilmu Pemerintahan melalui praktik mata kuliah seperti halnya yang disampaikan oleh mahasiswa bahwa :

“Untuk mendapatkan lulusan yang dapat mengaplikasikan teori dan berpikir kritis tidak hanya pemahaman konsep saja melainkan diperlukan pengalaman bagaimana teori tersebut di laksanakan, jadi untuk mata kuliah–mata kuliah yang ada dalam struktur kurikulum ilmu pemerintahan banyak materi yang bisa di praktikkan diantaranya yaitu manajemen pelayanan umum dengan alasan agar kita lebih mengetahui dan memahami serta penerapannya mengenai pelayanan prima “.

Dalam struktur kurikulum on going belum ada secara tegas mata kuliah mana saja yang ada praktiknya dari mata kuliah atau mata kuliah praktikum. Berdasarkan data kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan FHSIP UT on going belum ada, sesuai dengan pernyataan dari informan UT Daerah yang mengatakan bahwa :

“kami akan melaksanakan praktikum mata kuliah atau mata kuliah praktikum, asal sudah ada kejelasan dalam kurikulumnya, sudah ada simbol atau keterangan kalau mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah berpraktikum, tetapi untuk sampai saat ini saya lihat dalam kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan FHSIP UT itu belum ada tanda atau simbol bahwa mata kuliah ada yang berpraktik, jadi kami melakukan bimbingan di sini sesuai dengan yang tertuang dalam kurikulum”

Dengan Kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan FHSIP UT (Katalog Non Pendas, 2023/2024 : 90-97 ) sebagai berikut :

Tabel 5.6  
**Struktur Kurikulum Program Sarjana**  
**FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK**  
**Program Studi : 71/Ilmu Pemerintahan (S1)**

No	Mata Kuliah		sks	Waktu Ujian	Bahan Ajar yang Digunakan		Paket Arahan per Semester dan sks								Ket.			
	Kode	Nama			Kode	Nama	1	2	3	4	5	6	7	8				
1	MKDU4109	Ilmu Sosial dan Budaya Dasar	3	I.4	MKDU4109	Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Edisi 2* atau Edisi 3**)	3											T
2	Pilih salah satu sesuai Data Pribadi (DP)																	
	MKWU4101	Pendidikan Agama Islam	3	I.5	MKDU4221	Pendidikan Agama Islam (Edisi 2)	3											-
	MKWU4103	Pendidikan Agama Kristen	3	I.5	MKWU4103	Pendidikan Agama Kristen (Edisi 1)	3											-
	MKWU4102	Pendidikan Agama Katolik	3	I.5	MKWU4102	Pendidikan Agama Katolik (Edisi 2)	3											-
	MKWU4105	Pendidikan Agama Hindu	3	I.5	MKWU4105	Pendidikan Agama Hindu (Edisi 1)	3											-
	MKWU4104	Pendidikan Agama Buddha	3	I.5	MKWU4104	Pendidikan Agama Buddha (Edisi 1)	3											-
	MKWU4107	Pendidikan Agama Khonghucu	3	I.5	MKWU4107	Pendidikan Agama Khonghucu (Edisi 1)	3											-
3	ISIP4130	Pengantar Ilmu Hukum/PTHI	4	II.1	ISIP4130	Pengantar Ilmu Hukum/PTHI (Edisi 3* atau Edisi 4**)	4											T
4	MKWI4201	Bahasa Inggris	3	II.2	MKWI4201	Bahasa Inggris (Edisi 1* atau Edisi 2**)	3											WT, T
5	MKWU4108	Bahasa Indonesia	3	II.3	MKWU4108	Bahasa Indonesia (Edisi 2)	3											
6	MKWU4109	Pendidikan Kewarganegaraan	3	II.4	MKDU4111	Pendidikan Kewarganegaraan (Edisi 2* atau Edisi 3**)	3											

7	ISIP4211	Logika	3	I.1	ISIP4211	Logika (Edisi 2* atau Edisi 3**)	3											
8	ISIP4110	Pengantar Sosiologi	3	I.2	ISIP4110	Pengantar Sosiologi (Edisi 2* atau Edisi 3**)	3											
9	ISIP4212	Pengantar Ilmu Politik	3	II.1	ISIP4212	Pengantar Ilmu Politik (Edisi 1* atau Edisi 2**)	3											T
10	ISIP4215	Pengantar Statistik Sosial <sup>3)</sup>	3	II.3	ISIP4215	Pengantar Statistik Sosial (Edisi 3* atau Edisi 4**) #	3											T
11	IPEM4111	Pengantar Ilmu Pemerintahan	3	II.4	IPEM4111	Pengantar Ilmu Pemerintahan (Edisi 3* atau Edisi 4**)	3											WT, T
12	IPEM4321	Hukum Tata Pemerintahan	3	II.5	IPEM4321	Hukum Tata Pemerintahan (Edisi 3* atau Edisi 4**)	3											-
13	IPEM4215	Teori Politik	3	I.1	IPEM4215	Teori Politik (Edisi 3)	3											T
14	SKOM4101	Pengantar Ilmu Komunikasi	3	I.2	SKOM4101	Pengantar Ilmu Komunikasi (Edisi 3* atau Edisi 4**)	3											-
15	IPEM4318	Sistem Kepartaian dan Pemilu <sup>3)</sup>	3	I.3	IPEM4318	Sistem Kepartaian dan Pemilu (Edisi 2* atau Edisi 3**)	3											-
16	ISIP4214	Sistem Sosial Budaya Indonesia	3	I.5	ISIP4214	Sistem Sosial Budaya Indonesia (Edisi 2* atau Edisi 3**)	3											-
17	ISIP4213	Sistem Politik Indonesia <sup>3)</sup>	3	II.2	ISIP4213	Sistem Politik Indonesia (Edisi 2* atau Edisi 3**)	3											T
18	IPEM4320	Sistem Pemerintahan Indonesia <sup>1) **</sup>	3	II.3	IPEM4320	Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi 3* atau Edisi 4**)	3											WT, T
19	IPEM4214	Sistem Pemerintahan Daerah	3	I.2	IPEM4214	Sistem Pemerintahan Daerah (Edisi 3* atau Edisi 4**)	3											T
20	IPEM4317	Birokrasi Indonesia	3	I.4	IPEM4317	Birokrasi Indonesia (Edisi 3* atau Edisi 4**)	3											T
21	IPEM4309	Manajemen Konflik	3	I.5	IPEM4309	Manajemen Konflik (Edisi 3)	3											WT
22	EKMA4214	Manajemen Sumber Daya Manusia	3	II.2	EKMA4214	Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi 2* atau Edisi 3**)	3											-
23	IPEM4323	Legislatif Indonesia	3	II.3	IPEM4323	Legislatif Indonesia (Edisi 1* atau Edisi 2**)	3											T
24	IPEM4427	Sosiologi Pemerintahan	3	II.5	IPEM4427	Sosiologi Pemerintahan (Edisi 3* atau Edisi 4**)	3											-
25	IPEM4208	Sistem Pemerintahan Desa	2	I.1	IPEM4208	Sistem Pemerintahan Desa (Edisi 2)	2											-
26	IPEM4437	Kekuatan Sosial Politik Indonesia	3	I.2	IPEM4437	Kekuatan Sosial Politik Indonesia (Edisi 3* atau Edisi 4**)	3											T
27	ADPU4334	Kepemimpinan	3	I.4	ADPU4334	Kepemimpinan (Edisi 2* atau Edisi 3**)	3											-
28	IPEM4218	Manajemen Strategik Pemerintahan	3	I.5	IPEM4218	Manajemen Strategik Pemerintahan (Edisi 1* atau Edisi 2**)	3											-
29	IPEM4541	Perbandingan Pemerintahan	3	II.1	IPEM4541	Perbandingan Pemerintahan (Edisi 3* atau Edisi 4**)	3											-
30	ISIP4216	Metode Penelitian Sosial	3	II.2	ISIP4216	Metode Penelitian Sosial (Edisi 1* atau Edisi 2**)	3											WT, T
31	IPEM4407	Metodologi Ilmu Pemerintahan	3	II.5	IPEM4407	Metodologi Ilmu Pemerintahan (Edisi 2* atau Edisi 3**)	3											T
32	IPEM4428	Ekonomi Pemerintahan	3	I.2	IPEM4428	Ekonomi Pemerintahan (Edisi 1* atau Edisi 2**)	3											-
33	IPEM4430	Etika Pemerintahan	3	I.3	IPEM4430	Etika Pemerintahan (Edisi 4)	3											T
34	IPEM4431	Manajemen Pemerintahan	3	II.1	IPEM4431	Manajemen Pemerintahan (Edisi 3)	3											WT, T
35	IPEM4425	Hubungan Pusat Dan Daerah	3	II.3	IPEM4425	Hubungan Pusat dan Daerah (Edisi 3* atau Edisi 4**)	3											-
36	IPEM4319	Komunikasi Pemerintahan	3	II.4	IPEM4319	Komunikasi Pemerintahan (Edisi 2)	3											-
37	IPEM4424	Filsafat Pemerintahan	3	II.5	IPEM4424	Filsafat Ilmu Pemerintahan (Edisi 2* atau Edisi 3**)	3											T
38	IPEM4439	Perubahan Sosial dan Pembangunan <sup>2)</sup>	3	I.2	IPEM4439	Perubahan Sosial dan Pembangunan (Edisi 3* atau Edisi 4**)	3											WT, T

39	IPEM4433	Pembangunan Pemerintahan	3	I.3	IPEM4434	Pembangunan Politik (Edisi 3* atau Edisi 4**)												3	-						
40	ADPU4410	Kebijakan Publik	3	I.4	ADPU4410	Kebijakan Publik (Edisi 2* atau Edisi 3**)												3	T						
41	IPEM4429	Manajemen Pelayanan Umum	3	II.1	IPEM4429	Manajemen Pelayanan Umum (Edisi 3* atau Edisi 4**)												3	T						
42	IPEM4542	Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota	3	II.5	IPEM4542	Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota (Edisi 3* atau Edisi 4**)												3	-						
43	IPEM4500	Tugas Akhir Program (TAP)	4	0.2	ISIP4500	Panduan TAP FHSIP (Edisi 1* atau Edisi 2**)												4	E						
44	IPEM4560	Karya Ilmiah	0	99	MKWI4560	Panduan Mata Kuliah Karya Ilmiah Program Sarjana dan Diploma IV												0	Bw						
45	ADPU4534	Manajemen Logistik Organisasi Publik	3	I.1	ADPU4534	Manajemen Logistik Organisasi Publik (Edisi 2* atau Edisi 3**)												3							
46	IPEM4440	Keuangan Publik	3	I.4	IPEM4440	Keuangan Publik (Edisi 2* atau Edisi 3**)												3	WT, T						
47	ISIP4310	Sistem Ekonomi Indonesia	3	II.2	ISIP4310	Sistem Ekonomi Indonesia (Edisi 2* atau Edisi 3**)												3							
48	ADPU4442	Sistem Informasi Manajemen	3	II.4	ADPU4442	Sistem Informasi Manajemen (Edisi 3* atau Edisi 4**)												3	T						
49	ADPU4338	Manajemen Proyek	3	II.5	ADPU4338	Manajemen Proyek (Edisi 3* atau Edisi 4**)												3	T						
	<b>Total sks</b>		<b>145</b>															<b>19</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>15</b>

**Keterangan:**

Pada kolom **Nama Bahan Ajar:**

1. Jika tercantum hanya 1 edisi bahan ajar, maka bahan ajar yang digunakan berukuran A4.
2. Jika tercantum 2 edisi bahan ajar, maka bahan ajar yang digunakan **hanya salah satu saja** (ukuran A5 atau ukuran A4). Bahan ajar berukuran A5 maupun bahan ajar berukuran A4 isinya (konten) sama, **ukurannya saja yang berbeda.**

♦ : Bahan ajar berukuran A5

♦♦ : Bahan ajar berukuran A4

# : Bahan ajar disertai multimedia

Bahan ajar non cetak (BANC) dalam bentuk multi media sebagai pengayaan dapat diakses di <https://p2m2.ut.ac.id/banc/>

T : Tutorial Tatap Muka (TTM) untuk mahasiswa

SIPAS Semi Bw : Bimbingan Wajib

E : Ujian Esai

WT : Wajib Tuton untuk mahasiswa SIPAS Penuh dan SIPAS Plus

<sup>1)</sup> : Mata kuliah IPEM4320-Sistem Pemerintahan Indonesia, IPEM4214-Sistem Pemerintahan Daerah, dan IPEM4317-Birokrasi Indonesia dianjurkan diregistrasikan setelah Anda menempuh mata kuliah IPEM4111-Pengantar Ilmu Pemerintahan.

<sup>2)</sup> : Mata kuliah IPEM4439-Perubahan Sosial dan Pembangunan dianjurkan diregistrasikan setelah Anda menempuh mata kuliah ISIP4110-Pengantar Sosiologi.

<sup>3)</sup> : Mata kuliah ISIP4213-Sistem Politik Indonesia, IPEM4215-Teori Politik, dan IPEM4318-Sistem Kepartaian dan Pemilu dianjurkan diregistrasikan setelah Anda menempuh ISIP4212-Pengantar Ilmu Politik.

\*\* : Mata kuliah pendukung TAP IPEM4500 adalah:

1. IPEM4320 - Sistem Pemerintahan Indonesia
2. IPEM4431 - Manajemen Pemerintahan
3. ADPU4410 - Kebijakan Publik
4. IPEM4429 - Manajemen Pelayanan Umum
5. IPEM4439 - Perubahan Sosial dan Pembangunan

Mata kuliah pendukung TAP dianjurkan diregistrasikan sebelum atau bersamaan dengan registrasi TAP IPEM4500.

Waktu Ujian 99 : Tanpa Ujian Akhir semester (UAS), nilai mata kuliah sepenuhnya dari nilai laporan praktik/praktikum/karya ilmiah

Sumber : Katalog Kurikulum, 2023/2024

Dari Struktur Kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan FHSIP UT yang on going sampai saat ini memang belum ada simbol atau sks yang menerangkan bahwa mata kuliah yang berpraktikum atau mata kuliah praktikum, jumlah SKS yang tertera dalam struktur kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan FHSIP UT hanya sebatas jumlah SKS saja tidak ada satu mata kuliahpun yang dalam SKS berbobot praktikum, seperti halnya yang dikemukakan oleh informan dari UT Daerah & Pokjar, mengatakan bahwa :

*“Kami melakukan tutorial sesuai dengan kurikulum yang ada, di sini belum ada mata kuliah yang di praktikumkan karena dalam kurikulum tidak ada keterangan mata kuliah berpraktikum, jadi kalau disini melakukan tutorial sesuai dengan yang ada dalam katalog”*

Dari hasil wawancara yang dilakukan Tim Peneliti, dikemukakan masukan mengenai spesifikasi mata kuliah yang di praktikumkan. Mata kuliah yang materinya spesifik dan termasuk bermanfaat langsung. Informan mahasiswa mengemukakan :

*“Menurut saya materi yang khusus atau spesifik sangat perlu untuk di praktikkan agar dalam persaingan dengan kampus yang lain, mahasiswa UT tidak ketinggalan dengan adanya praktikum yang spesifik tersebut”.*

Praktikum mata kuliah Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FHSIP UT berdasarkan informan mahasiswa bahwa :

*“Alangkah baiknya pelaksanaan praktik mata kuliah ilmu pemerintahan dilakukan secara virtual (online), supaya saya dapat membagi waktu tanpa harus meninggalkan tugas pokok dan tanggungjawab sebagai karyawan”*

Sementara hasil FGD dengan pakar, Dr. Firman, S.Sos., M.A. mengemukakan bahwa “

*“Perlu ada mata kuliah yang dianggap penting untuk dapat pengalaman belajar. Softskill seperti kepemimpinan dan komunikasi diperlukan oleh mahasiswa. Tantangan kedua, kurikulum dituntut agar dapat relevan hingga 5-10 tahun ke depan. Tantangan selanjutnya adalah latar belakang mahasiswa itu sendiri. Tidak semua mata kuliah perlu ada praktikum, cukup mata kuliah yang memang ingin dicapai sebagai profil lulusan saja. Di kampus narasumber mengajar, magang diplotting oleh*

*kampus ke beberapa instansi mitra, namun harus dipilih-pilih agar sesuai dengan kebutuhan instansi. Menurut narasumber, magang diperlukan karena mahasiswa ingin punya pengalaman. Pembimbing harus ada, 1 dosen untuk beberapa mahasiswa. Laporan wajib dilakukan untuk mengikat mahasiswa agar dapat dipastikan benar hadir, ada laporan hariannya. Untuk program baru bisa diterapkan dahulu di beberapa daerah sebagai uji coba selama 1 semester. Jangan sampai mahasiswa magang di instansi dia bekerja, jangan sampai juga memberatkan mahasiswa. Perlu ditentukan keterampilan apa yang mau dicapai, kemudian dilakukan mapping dan disesuaikan dengan mata kuliah.”*

Selain itu, Dr. Ardi Johan Kusuma, S.IP., M.H.I. pada FGD mengemukakan bahwa:

*“Kurikulum di tiap kampus berbeda-beda, terutama dengan UPI yang memang kampus pendidikan. PR utama, yaitu dengan mensinkronkan profil lulusan dengan capaian pembelajaran. Untuk lulusan sarjana, yang paling cocok adalah menjadi analis dan pegiat sosial, karena sarjana tidak sampai evaluasi. Di RPS dilampirkan pedomannya agar mahasiswa dan tutor ada gambaran untuk apa mencapai nilai yang maksimal. Untuk SI Ilmu Politik, jika semua mata kuliah dipaksa untuk didekatkan dengan industri, dengan realita menjadi tidak ketemu. CPL dan profil lulusan ketika dirumuskan harus sesuai agar dapat memenuhi CPL. Tidak ada mata kuliah yang full praktikum karena sarjana lebih ke teori, full praktikum lebih ke diploma. Idealnya, program studi membuat pengkajian dengan profil mahasiswa sehingga ketika lulus mahasiswa tahu ingin menjadi apa. Disesuaikan dengan softskill yang diperlukan, seperti leadership. CPL yang telah dibuat bisa dibebankan ke mata kuliah-mata kuliah, 1 mata kuliah bisa mencapai beberapa CPL.”*

Berdasarkan data penelitian tersebut Program Studi Ilmu Pemerintahan FHSIP UT dalam mengimplementasikan tujuan dan capaian pembelajarannya harus ada ketegasan dalam kurikulum program studinya terutama yang berkaitan dengan mata kuliah yang akan di praktikumkan, harus sudah jelas mata kuliah mana saja yang akan di praktikumkan, selanjutnya diberikan kode atau simbol dalam kurikulumnya, supaya menjadi acuan bagi setiap mahasiswa. Mata kuliah yang di praktikumkan adalah mata kuliah yang materinya lebih khusus atau spesifik, atau mata kuliah inti dari Program Studi Ilmu Pemerintahan FHSIP UT, pelaksanaan praktikum bisa dilakukan secara virtual, dengan syarat adanya pedoman praktikum yang sudah pasti, dengan adanya mata kuliah yang berpraktikum atau mata kuliah praktikum akan menjadikan lulusan Universitas Terbuka dapat bersaing dengan Universitas yang lainnya.

### 5.2.5 Deskripsi Telaah *Dimensi Learning*

Didalam dimensi *learning* akan dibahas dua hal yaitu pertama mengenai proses pelaksanaan praktikum, kedua mengenai alat yang akan digunakan dalam proses penilaian pelaksanaan praktikum.

Berdasarkan hasil telaah pada dimensi Konteks, dimensi Integritas, serta dimensi Kurikulum maka pada proses pelaksanaan praktikum mata kuliah PS Ilmu Pemerintahan, mahasiswa diberikan materi yang terintegrasi dengan mata Kuliah Ilmu Pemerintahan, diberikan petunjuk dan arahan oleh pengampu/tutor/pembimbing mata kuliah tentang materi-materi yang akan di praktikumkan yang berada pada modul, serta tutor/pembimbing akan memberikan arahan tahapan-tahapan kegiatannya sesuai dengan pedoman praktikum Ilmu Pemerintahan, setelah diberikan arahan maka mahasiswa diwajibkan melaksanakan praktik kerja yang sudah di arahkan, mahasiswa dalam pelaksanaan praktikumnya akan dititipkan pada instansi Pemerintah atau perusahaan dimana mereka bekerja, bagi yang tidak bekerja atau belum bekerja maka mahasiswa akan di tempatkan praktik kerja di kelurahan/Desa setempat, sesuai dengan pernyataan mahasiswa mengatakan bahwa :

*“Saya tidak bekerja, kalau untuk praktik kerja saya kesulitan mencari tempat praktik, apakah saya diperbolehkan praktiknya itu hanya setingkat desa saja, supaya saya lebih mudah untuk proses ijinnya.”*

Alat yang akan di gunakan dalam evaluasi pelaksanaan praktikum mata kuliah Ilmu Pemerintahan yaitu dengan membuat laporan kerja praktik di setiap tema praktikumnya, sesuai dengan pernyataan dari informan mahasiswa mengatakan bahwa :

*“Secara berkala bisa diberikan tugas sesuai dengan teori yang ada, misalkan saja untuk mengirimkan contoh surat yang telah di buat di kantornya, contoh aplikasi computer yang di buat untuk mendukung pekerjaannya, dan lainnya. “*

Legalitas laporan praktik kerja harus adanya tandatangan pengesahan dari pimpinan setempat bahwa mahasiswa tersebut sudah melakukan praktik yang di tugaskan pada mahasiswa tersebut, pernyataan ini sesuai dengan informan dari UT Daerah mengatakan bahwa :

*“Untuk memudahkan penilaian pelaksanaan praktikum mata kuliah ilmu pemerintahan yaitu melalui laporan kerja praktik, dengan di tandatangani oleh pimpinan dimana mahasiswa tersebut menjalankan praktik, misalkan mahasiswa tersebut di tempatkan pada suatu dinas atau mahasiswa sudah bekerja pada instansi atau perusahaan tersebut, maka mahasiswa tersebut mempunyai atasan langsungnya, maka yang akan memberikan legalitas laporan praktik kerjanya yaitu pimpinan langsung dari mahasiswa tersebut.”*

Selain legalitas dalam laporan yang diberikan oleh mahasiswa kepada tutornya, laporan praktik mahasiswa dapat di jadikan ukuran penilaian dalam mata kuliah Ilmu Pemerintahan, karena laporan dapat menggambarkan perkembangan mahasiswa tersebut dalam memahami materi Ilmu Pemerintahan, serta mahasiswa belajar untuk dapat mencari cara menyelesaikan masalah yang di hadapi dalam pelaksanaan praktik mata kuliah Ilmu Pemerintahan. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat dari alumni PS Ilmu Pemerintahan yang menyatakan bahwa :

*“Menurut pendapat saya, bentuk laporan praktikum yang sesuai yaitu bentuk laporan praktikum yang menggambarkan bagaimana perkembangan mahasiswa tersebut mengikuti mata kuliah, bagaimana mahasiswa memahami modul/materi dalam mata kuliah dan bagaimana mahasiswa tersebut dapat menyelesaikan kasus dalam mata kuliah tersebut.”*

Berdasarkan informasi tersebut proses pelaksanaan praktikum mahasiswa yaitu dengan melakukan observasi partisipan ke instansi Pemerintah atau Perusahaan, dengan alat evaluasi adalah laporan praktik kerja yang dilegalisasi oleh pimpinan langsung atau pimpinan dari instansi Pemerintah atau Perusahaan tempat mahasiswa melakukan praktikum.

*Dimensi learning* secara keseluruhan dan penilaian yang selaras dengan hasil dan kegiatan terkait. Belajar melibatkan proses transformatif yang mengarah ke perubahan dalam pemahaman, penafsiran teori dengan praktik dan pertumbuhan disposisi pribadi. Belajar termasuk peluang untuk observasi, review dan refleksi untuk pelajar, diikuti dengan membuat koneksi dengan pengalaman.

### 5.2.6 Dekripsi Telaah *Dimensi Kemitraan*

*Dimensi keenam adalah kemitraan* dan melibatkan integrasi beberapa pemangku kepentingan di tingkat yang berbeda dalam konteks yang berbeda-beda, semua dengan tujuan bersama, kemitraan yang kuat dan tujuan bersama menghasilkan proses kegiatan praktikum mata kuliah lebih efektif.

Menurut Mahasiswa, pelaksanaan praktikum mata kuliah PS Ilmu Pemerintahan dalam pelaksanaan praktikum perlu bermitra dengan instansi pemerintah. Mahasiswa mengemukakan sebagai berikut :

*Perlu kemitraan, mengingat kesinambungan praktikum kedepannya saling berkesinambungan juga dapat menghasilkan kerja sama yang baik dan saling menguntungkan bagi instansi pemerintah dan pihak universitas.*

Ketika ditanyakan lebih lanjut terkait mitra lainnya yang bisa dijadikan tempat belajar/praktik mata kuliah PS Ilmu Pemerintahan. Informan UT Daerah mengemukakan berikut :

*Instansi pemerintahan, lembaga lembaga swasta yang menyelenggarakan pelayanan publik*

Berdasarkan hasil telaah pada dimensi konteks, dimensi integritas, dimensi kurikulum serta dimensi learning, maka dalam proses pelaksanaan praktikum mata kuliah Ilmu Pemerintahan tetap harus diutamakan dimensi kemitraan. Dimensi kemitraan ini tidak lain adalah salah satu dimensi yang dapat memperlancar pelaksanaan praktikum mata kuliah untuk mahasiswa, seperti halnya disampaikan informan instansi mengatakan bahwa :

*“Menjalin kerjasama antara perguruan tinggi dengan Instansi Pemerintah atau perusahaan guna pelaksanaan praktikum sangat penting, agar mahasiswa bisa langsung menjalankan praktik mata kuliah, serta dengan adanya keterlibatan instansi pemerintah maka akan memperkuat kebenaran dan keabsahan praktikum yang dilaksanakan.”*

Jadi dari pernyataan tersebut perguruan tinggi sebelum dimulainya pelaksanaan praktikum mata kuliah sudah membuat komitmen dengan instansi terkait dalam pelaksanaan praktikum mata kuliah, yaitu dengan legalisasi melalui MOU, sesuai dengan pernyataan dari UT Daerah yang mengatakan bahwa :

*“Kami punya pengalaman dalam menjalankan praktikum Program Studi Ilmu Hukum yaitu dengan pengadilan, maka kami melakukan MOU dengan pengadilan tersebut, serta kami menugaskan pegawai pengadilan dijadikan pembimbing kelompok mahasiswa yang praktik di pengadilan, dan pembimbing yang kami tugasi kami memberikan honorinya sesuai dengan aturan keuangan yang ada di UT, selain MOU kami pun bermitra dengan baik di setiap Instansi Pemerintah dan Perusahaan, karena mahasiswa kami banyaknya itu dari Instansi Pemerintah dan Perusahaan, jadi kami pergi kemanapun kami di sambut baik sama mereka.”*

Dari data tersebut bahwa pelaksanaan praktikum Mata kuliah Ilmu Pemerintahan dapat terlaksana dengan baik, karena pihak UT Daerah sudah bermitra dengan Instansi Pemerintah maupun Perusahaan dengan baik.

### **5.2.7 Deskripsi Telaah Dimensi Dukungan**

*Dimensi ketujuh adalah dukungan yang diberikan kepada siswa, organisasi dan mentor untuk mengakomodasi beragam kebutuhan termasuk komponen praktis, administrasi, pendidikan dan emosional. Terkait komponen alat yang dibutuhkan, informan Mahasiswa, Alumni, dan Pokjar memberikan informasi sebagai berikut :*

*Pada umumnya yang dibutuhkan mahasiswa adalah ATK dan juga penunjang lainnya seperti laptop dan juga gadget untuk membantu proses praktikum*

Ketika ditanyakan surat perijinan dalam pelaksanaan praktikum mata kuliah PS Ilmu Pemerintahan, informan UT Daerah, Alumni dan Instansi menyatakan :

*Seperti biasanya, di instansi saya bekerja didinas kependudukan dan pencatatan sipil hampir setiap tahunnya ada mahasiswa yang praktik lapangan dan juga siswa siswa dari SLTA seperti SMK, lembaga yang mengirim seperti sekolah dan universitas hanya menyurati Dinas dimaksud untuk bermohon dan menerima mahasiswanya untuk praktik, namun demikian jika pihak UT dapat melakukan praktik ini secara berkesinambungan maka alangkah baiknya kemitraan ini dapat dilakukan.*

Menurut Anda surat ijin melakukan praktik bermitra dengan instansi lain tersebut di keluarkan oleh siapa (UPBJJ UT, Program Studi, Fakultas) yang menurut Anda mudah dan cepat surat itu di terima, Informan yang diwawancarai seperti Mahasiswa, Alumni, Pakar Ilmu Pemerintahan, Instansi mengemukakan sebagai berikut :

*Lebih bagusnya menurut saya di UT Daerah, karena sedikit tidaknya UT Daerah juga lebih mengetahui keadaan di lapangan tempat mahasiswanya yang ingin praktik, dan juga kemitraan dapat di bangun oleh UT Daerah dengan instansi di daerah tersebut,*

*Seperti contohnya kerjasama UPBJJ UT Banda Aceh dengan BANK BSI, yakni Bank BSI telah dapat mengakses atau melakukan transfer uang pendidikan ke pihak UT, dengan demikian kedua belah pihak saling menguntungkan dan juga mahasiswanya sangat terbantu dengan program tersebut.*

Berdasarkan informasi tersebut dimensi dukungan ini dapat dilaksanakan dengan cara menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait, yang dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan praktikum mata kuliah pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FHSIP Universitas Terbuka.

Sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktikum mata kuliah PS Ilmu Pemerintahan menurut mahasiswa adalah sarana dan prasarana seperti komputer, jaringan dan template penulisan laporan. Selain itu juga mahasiswa mengemukakan perlunya dukungan surat pengantar atau surat perizinan seperti yang dikemukakan berikut:

*“Menurut saya dalam pelaksanaan praktikum mata kuliah PS Ilmu Pemerintahan ini perlu surat perijinan bila praktik di lakukan bermitra dengan instansi lain karena sangat dibutuhkan oleh suatu instansi yang akan ditempati tersebut identitas dari mahasiswa tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan/penilaian. Menurut saya surat ijin melakukan praktik bermitra dengan instansi lain tersebut di keluarkan oleh UPBJJ UT langsung sehingga mudah dan cepat surat itu di terima oleh instansi yang ditempati magang.”*

## **BAB 6.** **RENCANA TAHAP BERIKUTNYA** **(TAHUN KEDUA, 2024)**

Penelitian ini terdiri dari dua tahap penelitian, *tahap pertama* (2023) yaitu proses identifikasi model praktikum Mata kuliah Ilmu Pemerintahan, dengan di dasari oleh 7 (tujuh) dimensi model praktikum, yang dijadikan acuan yaitu teori yang digunakan dalam penelitian tahap pertama yaitu Model Pembelajaran Kerja Terintegrasi ini terdiri dari 7 (tujuh) dimensi yang menyelaraskan dengan komponen praktikum. Cooper et al. (2010) mengusulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan model pembelajaran kerja terpadu perlu mencakup semua tujuh dimensi. Penting untuk dicatat bahwa tujuh dimensi tidak dianggap hirarkis atau saling eksklusif. Ke 7 dimensi tersebut yaitu : Tujuan, Konteks, Integrasi, Kurikulum, Learning, Kemitraan, Dukungan. Hasil identifikasi penelitian pertama menghasilkan rekomendasi model praktikum mata kuliah pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FHSIP Universitas Terbuka

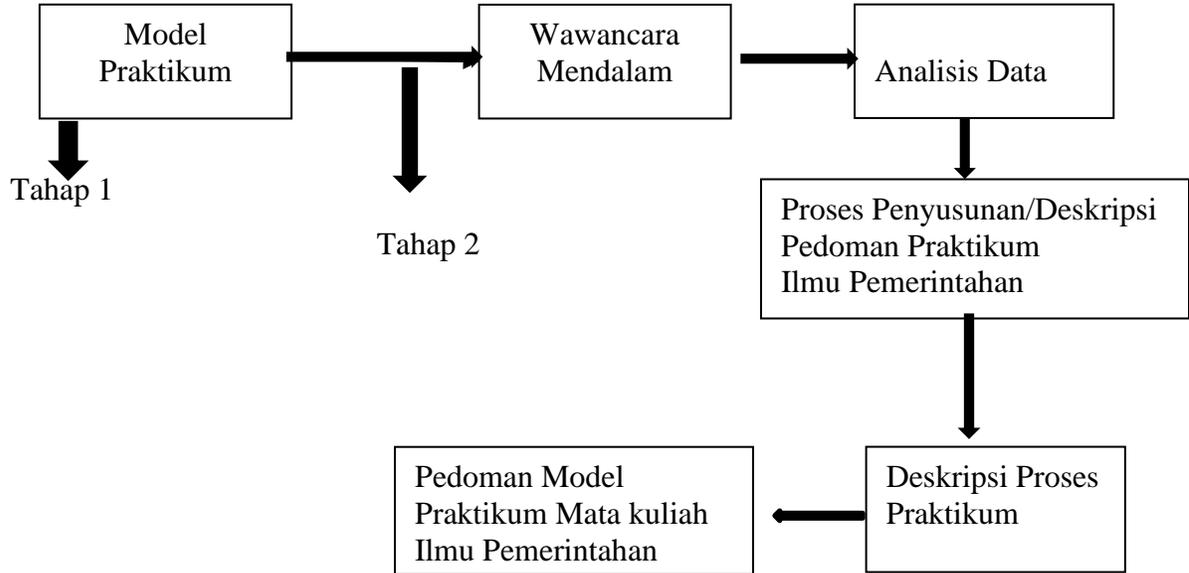
*Tahap ke dua* yaitu rencana tahap berikutnya pada tahun kedua (2024) akan dilakukan penelitian lanjutan ke lapangan mengenai pembuatan pedoman Pelaksanaan Praktikum Mata kuliah Ilmu Pemerintahan, hasil penelitian pada tahap pertama akan dijadikan acuan untuk pelaksanaan dalam pembuatan pedoman praktikum Ilmu Pemerintahan.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk rencana tahapan berikutnya adalah :

1. Melakukan wawancara dengan stakeholder yang terkait dengan proses pelaksanaan praktikum Mata kuliah Ilmu Pemerintahan, diantaranya yaitu, Ketua Program Studi Penyelenggara Program Studi Ilmu Pemerintahan, UT Daerah dalam Struktur sebagai PTN-BH, dan Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI Pusat dan Daerah).
2. Hasil analisis data dalam penelitian ini menjadi dasar bagi proses penyusunan/Deskripsi pedoman praktikum matakuliah Ilmu Pemerintahan.
3. Dihasilkannya pedoman praktikum Mata kuliah PS Ilmu Pemerintahan.

**Gambar 6.1**

**Desain Penelitian Tahap 2**





## **BAB 7**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Salah satu tujuan Program Studi Ilmu Pemerintahan FHSIP UT yaitu “*Menghasilkan sarjana Ilmu Pemerintahan yang mampu menggunakan konsep dan teori administrasi negara dan dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan domain publik, serta memecahkan masalah yang terjadi didalamnya*”” dengan capaian pembelajaran “*berpikir kritis yang berhubungan dengan disiplin ilmu administrasi publik*” untuk mencapai tujuan dan capaian pembelajaran tersebut dapat tercapai dengan di selenggarakan praktikum dalam pelaksanaan pembelajarannya, karena semua elemen penyelenggara pendidikan diantaranya Program Studi, FHSIP UT, UT Daerah, serta Kelompok Belajar Mahasiswa (Pokjar) mempunyai tujuan yang sama, begitu pula di perkuat dari pihak mahasiswa secara individual yang menginginkan adanya praktik dari teori yang mereka terima.
2. Dalam mengimplementasikan tujuan dan capaian pembelajaran mata kuliah secara eksplisit ditegaskan dalam struktur kurikulum program studi terutama yang berkaitan dengan mata kuliah yang akan di praktikumkan, harus sudah jelas mata kuliah mana saja yang akan di praktikumkan, selanjutnya diberikan kode atau simbol dalam kurikulumnya, supaya menjadi acuan bagi setiap mahasiswa dan UT Daerah, serta mata kuliah yang akan di praktikumkan adalah mata kuliah yang materinya lebih khusus atau spesifik, atau mata kuliah inti dari Program Studi Ilmu Pemerintahan yang disepakati dalam asosiasi (KAPSIPI) yang disesuaikan dengan ciri program studi di masing-masing perguruan tinggi yang memiliki program studi/kajian ilmu pemerintahan, pelaksanaan praktikum dapat dilakukan secara hybrid, (langsung dan online/virtual), dengan syarat adanya pedoman praktikum yang sudah pasti, dengan adanya mata kuliah yang berpraktikum atau mata kuliah praktikum akan menjadikan lulusan program studi dapat bersaing.
3. Model praktikum mata kuliah yang dikembangkan adalah pilihan dari berbagai kegiatan unggulan dalam bidang pemerintahan yang secara general dapat dilaksanakan oleh mahasiswa dimanapun berada yang pelaksanaannya dapat dipraktikkan di tempat kerja

atau lokasi mahasiswa dimanapun berdomisili, dan kriteria untuk tutor/instruktur harus memiliki kualifikasi keilmuan yang sesuai dan memiliki pengalaman dalam bidang pemerintahan. Untuk proses pelaksanaan praktikum mata kuliah PS Ilmu Pemerintahan mahasiswa melakukan observasi partisipan ke instansi pemerintah atau perusahaan, dengan alat evaluasi adalah laporan praktik kerja yang dilegalisasi oleh UT Daerah, pimpinan langsung atau pimpinan dari instansi pemerintah atau perusahaan tempat mahasiswa melakukan praktik mata kuliah

4. Berdasarkan karakteristik yang melekat pada mahasiswa dan tutor untuk pelaksanaan praktikum mata kuliah Ilmu Pemerintahan, dapat dilakukan di tempat kerja atau lokasi dimana mereka berdomisili dengan arahan dari UT Daerah, dan tutor/pembimbing mata kuliah Ilmu Pemerintahan yang kompetensinya tidak di ragukan lagi.
5. Untuk proses pelaksanaan praktikum mahasiswa melakukan observasi partisipan ke instansi Pemerintah atau perusahaan, dengan alat evaluasi adalah laporan praktek kerja yang dilegalisasi oleh pimpinan langsung atau pimpinan dari instansi Pemerintah atau Perusahaan tempat mahasiswa melakukan praktik.
6. Untuk menjamin kualitas dari praktikum ini diperlukan dukungan dari lembaga-lembaga yang mempunyai legalitas memberikan idea untuk materi praktikum serta sertifikat untuk legalisasi praktikum.
7. Implementasi dukungan mata kuliah praktikum dilaksanakan dengan cara menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait, yang dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan praktikum mata kuliah pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FHSIP Universitas Terbuka

## B. Rekomendasi/Saran

1. Dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dikemukakan tentang penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai bidang pekerjaan. Untuk itu agar ditegaskan dalam

struktur kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan nama mata kuliah-mata kuliah berpraktik guna menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah suatu mata kuliah atau bagian mata kuliah tertentu. Di dalam struktur kurikulum dipastikan bobot/sks praktikum dalam mata kuliah praktikum, di beri bobot antara 2 + 1 SKS sesuai kepastian jumlah jam praktikum.

2. Penentuan mata kuliah praktikum didasarkan pada kompetensi sejenis dan atau serumpun, seperti praktikum mata kuliah bidang manajemen pemerintahan terdiri dari mata kuliah Manajemen Pemerintahan, Manajemen Strategik Pemerintahan, Manajemen Konflik, Manajemen Kebencanaan, Manajemen Sumber Daya Manusia), mata kuliah bidang pemerintahan terdiri dari mata kuliah Sistem Pemerintahan Indonesia (Pemerintahan Nasional), Sistem Pemerintahan Daerah, dan Sistem Pemerintahan Desa, jadi lebih spesifik, fokus dan dapat dipilih jenis praktikumnya dan dapat diimplementasikan di semua tempat/domisili mahasiswa.
3. Penugasan praktikum mata kuliah dilakukan per mahasiswa atau per kelompok mahasiswa. Langkah pertama, program studi mengarahkan kepada mahasiswa ke lembaga/instansi sebagai objek dari praktikum/sebagai mitra, selanjutnya menerbitkan surat perijinan/legalitas di lapangan. Langkah kedua, hasil praktikum ditulis dalam bentuk laporan makalah dan hal ini dilakukan dengan proses bimbingan dari tutor atau pembimbing praktikum Langkah ketiga, laporan praktikum diuji keabsahannya. Langkah terakhir, menguji kelayakan melalui dosen/tutor pembimbing dan laporan hasil ujian di unggah di website FHISIP di ruang/rumah PS Ilmu Pemerintahan sebagai bahan ajaran, referensi ilmu pengetahuan, masukan dan saran lembaga pemerintahan.
4. Pratikum mata kuliah sebagai kegiatan belajar dalam bentuk model pengamatan, berupa praktik yang di lakukan di laboratorium bidang pemerintahan dengan pengenalan pada analisis website di beberapa pemerintah daerah yang sudah menggunakan teknologi informatika, menggunakan metode kualitas pelayanan pemerintah, kualitas pelayanan e-government, dan situs administratif public bagi mahasiswa yang berdomisili di daerah perkotaan. Untuk di daerah perdesaan dengan cara magang di kantor pemerintahan desa yang intinya dapat memberikan pengalaman kerja dan pembelajaran secara langsung serta berkesan.

5. Secara konteks model praktikum mata kuliah dapat dilakukan dengan memberi tugas kepada mahasiswa untuk mengerjakan/mempraktikkan pekerjaan kekhususan analisis kebijakan di pemerintahan dengan diberi tugas membuat policy brief tentang permasalahan kebijakan di instansi pemerintah wilayah domisilinya. Data kasus dieksploitasi oleh mahasiswa dengan cara bertanya kepada instansi setempat, sehingga mahasiswa PS Ilmu Pemerintahan dalam berpraktikum berkontribusi memecahkan masalah.
6. Untuk memperlancar proses pelaksanaan praktikum mata kuliah, jalinan kerjasama/kemitraan dengan instansi terkait dengan legalisasi perjanjian kerjasama (PKS), seperti dengan Lembaga/Perguruan Tinggi Penyelenggara Laboratorium Praktikum Bidang Pemerintahan, Pimpinan Fakultas/Prodi, UT Daerah, Instansi Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/BUMD atau Perusahaan Swasta, dan Asosiasi (KAPSIPI).
7. Mata kuliah yang dapat dipraktikkan merupakan mata kuliah yang berbasis keterampilan bukan mata kuliah yang bersifat umum dengan tujuan bermanfaat dengan berbagai pihak, mahasiswa, alumni dan pengguna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ashby, C. M. (2002). *Distance education: Growth in distance education programs and implications for federal education policy*. <http://www.gao.gov/new.items/d021125t.pdf>
- Cohen, D. K., & Ball, D. L. (1999). *Instruction, capacity, and improvement. Consortium for Policy Research in Education (CPRE) Research Report Series*. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania.
- Cooper, L., Orrell, J., & Bowden, M. (2010). *Work-integrated learning: A guide to effective practice*. New York: Routledge.
- Creswell, J. W. 1998. *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five designs*. Thousand Oaks, CA: Sage
- Education Development Center. (2011). *Distance Education for Teacher Training : Modes, Models and Methods*. Washington DC
- Falkenberg, T., & Smits, H. (eds.). (2010). *Field experiences in the context of reform of Canadian teacher education programs*. Volume 1. Winnipeg, Canada: Faculty of Education, University of Manitoba.
- Fillip, B. (2001). *Distance education in Central America and the Caribbean: Making the most of the region's experience and tackling challenges and opportunities of the new information and communications technologies*. Tokyo, Japan, and Washington, DC: Japan International Cooperation Agency.
- Hartini, Sri (2001), *Model Kolaborasi Untuk Penyelenggaraan Praktikum Dalam Sistem Pendidikan Tinggi Jarak Jauh* dalam Jurnal PTJJ Vol 2.1 : 2001. <http://simpen.lppm.ut.ac.id/ptjj/PTJJ%20Vol%202.1%20maret%202001/21hari.htm>
- Hartono, dkk.(2009) *Model Blended learning Pada Perkuliahan Praktikum IPA : Studi Kasus Pada Pendidikan Jarak Jauh S1 PGSD*, dalam *Prosiding seminar Nasional kimia dan pendidikan Kimia*, 37). [http://snkpk.fkip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/A-01\\_Model-Blended-Learning-pada-Perkuliahan-Praktikum-IPA-Studi-Kasus-pada-Pendidikan-Jarak-Jauh-S1-PGSD\\_Hartono-Nuryani-Y.-Rustaman-Suhardi-Andi-Suhandi.pdf](http://snkpk.fkip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/A-01_Model-Blended-Learning-pada-Perkuliahan-Praktikum-IPA-Studi-Kasus-pada-Pendidikan-Jarak-Jauh-S1-PGSD_Hartono-Nuryani-Y.-Rustaman-Suhardi-Andi-Suhandi.pdf)
- Higher Education Quality Council of Ontario (2014) *Innovative Practicum Models in Teacher Education: The Benefits, Challenges and Implementation Implications of Peer Mentorship, Service Learning and International Practicum Experiences*. Toronto Canada

- Keegan, D. (1980). *On defining distance education*. Distance Education 1(1), 13–36
- Le Cornu, R., & Ewing, R. (2008). *Reconceptualizing professional experiences in pre-service teacher education: Reconstructing the past to embrace the future*. Teaching and Teacher Education, 24, 1799-1812.
- Seagall, A (2002). *Disturbing practice. Reading teacher education as text*. New York : Peter Lang
- Schulz, R. (2005). *The practicum: More than practice*. Canadian Journal of Education, 28(1/2), 147-167.
- Sloan Consortium. (2008). *Staying the course: Online education in the United States*. Wellesley, MA: Babson College.
- Zeichner, K. (1996). *Designing educative practicum experiences for prospective teachers*. In K. Zeichner, S. Melnick, & M. Gomez (Eds.), *Currents of reform in pre-service teacher education* p. 215-234). New York: Teachers College Press.
- <http://yogyakarta.ut.ac.id/index.php/profil-upbjj-2/tentang-upbjj>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**